

No. 156 Januari - Februari 2019

www.bakti.or.id

BaKTI**News**

MEMAHAMI KTI DENGAN SEKSAMA



**PENGALAMAN PENUH PENGETAHUAN,
BUDAYA DAN SPIRITUAL**

**BERITA DENGAN PERSPEKTIF
PEREMPUAN DAN ANAK**

**PEMANTAUAN DAN PENILAIAN PKS
KOTA MAKASSAR DAN KABUPATEN GOWA**

**PROGRAM RINTISAN KAT GURU BERHASIL
MENINGKATKAN HASIL BELAJAR MURID**

TIDAK DIPERJUALBELIKAN
NOT FOR SALE

ISSN 1979-777X



9 771 979 777 057



BaKTI**News**

MEMAHAMI KTI DENGAN SEKSAMA

ISSN 1979-777X

www.bakti.or.id

Penanggung Jawab **M. YUSRAN LAITUPA**
ZUSANNA GOSAL
Editor **VICTORIA NGANTUNG**
ITA MASITA IBNU
FADHILAH IQRA MANSYUR
Events at BaKTI **SHERLY HEUMASSE**

Smart Practices
& Info Book **SUMARNI ARIANTO**
Database
Kontak **INDINA ISBACH**
Design & layout
Editor Foto **FRANS GOSALI**

Redaksi

Jl. H.A. Mappanyukki No. 32 Makassar 90125, Sulawesi Selatan - Indonesia Telp. +62 411 832228, 833383 Fax +62 411 852146
Email info@bakti.or.id atau baktinews@bakti.or.id SMS BaKTINews** 0813 4063 4999, 0815 4323 1888, 0878 4000 0201**
Facebook www.facebook.com/yayasanbakti Twitter @InfoBaKTI

BaKTI**News** adalah media pertukaran pengetahuan tentang pembangunan di Kawasan Timur Indonesia. Tujuan BaKTI**News** adalah mempromosikan praktik cerdas pembangunan dari berbagai daerah di Kawasan Timur Indonesia agar dapat diketahui oleh khalayak luas dan menginspirasi pelaku pembangunan di berbagai daerah dalam upaya menjawab berbagai tantangan pembangunan. BaKTI**News** terbit setiap bulan dalam dua bahasa, Indonesia dan Inggris, untuk memudahkan pembaca dalam mendapatkan informasi pembangunan dari Kawasan Timur Indonesia.

BaKTI**News** disirkulasi melalui pos kepada pembaca dengan target utama adalah para pelaku pembangunan yang berdomisili di daerah kepulauan dan daerah terpencil. Tidak dikenakan biaya apapun untuk berlangganan BaKTI**News** agar lebih banyak masyarakat yang dapat mengakses informasi pembangunan melalui majalah ini. Selain dalam bentuk cetak, BaKTI**News** juga dapat diakses di website BaKTI: www.bakti.or.id dan dikirimkan melalui email kepada pelanggan yang dapat mengakses internet.

BaKTI**News** dikelola oleh Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI). Seluruh artikel BaKTI**News** adalah kontribusi sukarela para pelaku pembangunan dari berbagai kalangan dan daerah yang ingin berbagi pengetahuan dengan khalayak luas.

*BaKTI**News** is a knowledge exchange media platform for development issues in eastern Indonesia. BaKTI**News** aims to promote development smart practices from different regions in eastern Indonesia so that the practices become known to a wider audience and inspire development stakeholders in other regions in their efforts to answer development challenges. BaKTI**News** is published monthly in two languages, Indonesian and English, to facilitate readers who don't understand Indonesian to gain a better understanding of development in eastern Indonesia.*

*BaKTI**News** is sent by post to readers and the main target is development stakeholders living in isolated regions and island regions. BaKTI**News** is provided free of charge so the development community can access relevant development information easily. BaKTI**News** is also provided in an electronic version that can be accessed on www.bakti.or.id and can be sent electronically to subscribers with internet access.*

*BaKTI**News** is managed by the Eastern Indonesia Knowledge Exchange (BaKTI). All articles are contributed voluntarily by development stakeholders from different areas in eastern Indonesia who wish to share their information with a wider audience.*

BERKONTRIBUSI UNTUK BaKTI**News** *Contributing to BaKTI**News***

BaKTI**News** menerima artikel tentang kemajuan pembangunan, pembelajaran dari suatu kegiatan, praktik cerdas pembangunan, hasil-hasil penelitian yang dapat diaplikasikan, dan teknologi tepat guna dari berbagai daerah di Kawasan Timur Indonesia (Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua).

Panjang artikel adalah 1.000 - 1.100 kata, menggunakan Bahasa Indonesia maupun Inggris, ditulis dengan gaya populer. Foto-foto penunjang artikel sangat dibutuhkan. Tim editor BaKTI**News** akan melakukan edit terhadap setiap artikel yang akan dimuat untuk kesesuaian tempat dan gaya bahasa. Redaksi BaKTI**News** tidak memberikan imbalan kepada penulis untuk setiap artikel yang dimuat.

*BaKTI**News** accepts articles about development programs, lessons learnt from an activity, development smart practices, research results that can be applied, and applied technology from different stakeholders and regions in eastern Indonesia (Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, and Papua). Articles should be 1,000-1, 100 words, in either Indonesian or English, and written in a popular style.*

*Articles should also be sent with photos that illustrate the article. The editors of BaKTI**News** will edit every article for reasons of space and style. BaKTI**News** does not provide payment to writers for articles.*

MENJADI PELANGGAN BaKTI**News** *Subscribing to BaKTI**News***

Untuk berlangganan BaKTI**News**, silahkan mengirimkan data diri anda (organisasi, posisi, nomor HP, alamat email) lengkap dengan alamat lengkap yang disertai dengan kode pos melalui email baktinews@bakti.or.id.

Bagi yang berdomisili di Makassar, Anda dapat mengambil BaKTI**News** di Display Corner Gedung BaKTI pada setiap hari kerja.

*To subscribe to BaKTI**News** please send us your full contacts details (including organization, position, HP number and email address) with full postal address to baktinews@bakti.or.id.*

For those living in Makassar, please stop by the BaKTI office and pick up your copy from the display corner from Monday to Friday.

Daftar Isi

BaKTI News

Januari - Februari 2019

No. 156

- 1** Pengalaman Penuh Pengetahuan, Budaya dan Spiritual
Oleh **ESTER ELISABETH UMBU TARA**
- 5** Desain Baru Tata Pemerintahan untuk Mewujudkan Gagasan Poros Maritim Dunia
Oleh **FADEL BASRIANTO**
- 9** Pastor Vesto dan Perjuangannya untuk Orang Asmat (Bagian 2)
Oleh **PETRUS SUPARDI**
- 13** Berita dengan Perspektif Perempuan dan Anak
Oleh **M. GHUFRAN H. KORDI K.**
- 17** Pemantauan dan Penilaian PKSAI Kota Makassar dan Kabupaten Gowa
Oleh **ARAFAH**
- 21** Rinding Allo, Matahari di antara Dua Dinding
Oleh **M. YUSUF WEANDARA**
- 25** Pelatihan Kompetensi Analisis Kebijakan di Aceh
Oleh **RIO AFIFUDDIN**
- 29** Antenatal Care Hipnoterapi
Oleh **ANJAS RUSLI**
- 33** Program Rintisan Kiat Guru Berhasil Meningkatkan Hasil Belajar Murid *Indonesia's Kiat Guru Pilot – Improving Student Learning Outcomes*
Oleh **DEWI SUSANTI dan SHARON KANTHY**
- 36** Mengubah Disabilitas menjadi Kemampuan
Oleh: **ZUZANA STANTON-GEDDES, JOLANTA KRYSPIIN-WATSON**
- 39** Update Batukarinfo
- 40** Kegiatan di BaKTI
- 41** Info Buku

■ Foto Cover : N.J. Tangkepayung/Yayasan BaKTI

Sungai adalah jalan tol yang menghubungkan satu kampung dengan kampung lainnya di Asmat.

Foto: Rahman Ramlan/Yayasan BaKTI





Pengalaman Penuh Pengetahuan, Budaya dan Spiritual

Oleh **ESTER ELISABETH UMBU TARA**

Isu dan topik kami sebagai penerima Program INSPIRASI yang berbeda-beda membuat kami mendapat pengetahuan yang beragam. Kami belajar banyak hal, mulai dari mengenal diri sendiri sebagai aset perubahan.

Menjadi salah satu peserta program INSPIRASI adalah sebuah kebanggaan tersendiri. Dikemas dengan sangat baik, program ini memberi lebih dari yang dapat saya bayangkan. Bukan saja memperoleh pengetahuan baru terkait topik yang ingin saya pelajari.

Sebagai seorang *campaigner* pangan lokal, saya diberi kesempatan untuk mengunjungi komunitas-komunitas yang berfokus pada masalah pangan, seperti *Papatuanuku kokiri marae* yang mengembangkan pangan lokal



Foto : Ester Elisabeth Umbu Tara / INSPIRASI

dengan nilai-nilai Maori yang kuat. Mereka bukan sekedar menanam, namun juga mempertahankan budaya mereka dan menghubungkan satu kelompok masyarakat dengan lainnya serta mengembangkan kesejahteraan masyarakat melalui pangan organik yang mereka kembangkan.

Saya juga berkesempatan mengunjungi sebuah kafe bernama *The Village* untuk belajar bagaimana pangan lokal menjadi peluang usaha yang bagus namun sehat bagi masyarakat yang mengonsumsinya. Kafe ini didirikan atas dasar kepedulian beberapa orang yang ingin agar masyarakat memiliki pilihan makan sehat selain makanan cepat saji. Untuk mengetahui nilai-nilai gizi, saya berkesempatan mengikuti workshop yang di selenggarakan oleh *Heart Foundation* dan bertemu dengan orang-orang yang mendorong kemajuan komunitasnya melalui pangan.

Bukan hanya saya, teman-teman yang lain juga mendapat kesempatan yang sama. Sherly Anowali memiliki kesempatan untuk mengunjungi Shakti yang fokus di dalam memperjuangkan hak-hak wanita imigran. Tirsa Kailola mengunjungi sekolah-sekolah dan mempelajari kurikulum yang berbeda namun menarik untuk dipelajari dan dikembangkan sesuai konteks daerahnya.

Teman saya yang lain, Fauzan Ade Azizi, berkesempatan melihat beberapa kewirausahaan sosial dan belajar tentang keterlibatan masyarakat

dengan disabilitas dalam dunia kerja. Rosa de Panda mengunjungi tempat di mana pemerintah mengelola sampah sementara Citra Al Rasyid mengunjungi beberapa pusat wisata di Auckland untuk belajar tentang ekowisata.

Andi Arifayani, teman saya dari Makassar, mengunjungi Shine dan belajar tentang penerapan kurikulum dalam mencegah kekerasan seksual terhadap anak, dan banyak komunitas lainnya yang kami kunjungi. Kegiatan kunjungan ini dilakukan setiap minggu untuk membantu kami menemukan ide-ide segar dan menginspirasi dalam mengerjakan proyek kami nanti di daerah masing-masing.

Isu dan topik kami sebagai penerima Program INSPIRASI yang berbeda-beda membuat kami mendapat pengetahuan yang beragam. Kami belajar banyak hal, mulai dari mengenal diri sendiri sebagai aset perubahan. Pada bagian ini kami berkesempatan untuk melihat diri sendiri sebagai aset yang berharga bagi organisasi kami, keluarga dan daerah kami dalam melakukan suatu perubahan. Dengan memulai dari diri kami sendiri memberi kami kekuatan dan kepercayaan diri untuk terus mengembangkan diri sebelum akhirnya kami kembali ke masyarakat sebagai agen perubahan. Kami juga mendapatkan sesi khusus untuk berdiskusi dan mendalami isu-isu gender, mulai dari hak-hak perempuan, bagaimana perkembangan kesetaraan gender di New Zealand dan Indonesia, undang-undang yang melindungi perempuan atau yang tidak sensitif gender dan sampai pada peran wanita di dalam menghadapi perubahan iklim. Semua ini penting karena di dalam proyek yang kami kerjakan haruslah proyek yang sensitif gender. Ternyata isu gender bukanlah masalah di permukaan saja, namun perkara yang lebih dalam dan bukan hal yang mudah. Walaupun demikian, dengan pemahaman dan penerapan yang tepat, persoalan gender dapat dihadapi dengan lebih baik di masa depan ketika lebih banyak pihak yang peduli.

Kami juga belajar tentang kewirausahaan sosial. Kami ditantang untuk mengidentifikasi ide-ide yang dapat menjadi peluang bagi organisasi kami masing-masing sehingga di masa depan tidak terbentur masalah pendanaan karena telah memiliki kapasitas kewirausahaan yang dibutuhkan.

Selain itu kami juga belajar tentang peluang pariwisata dari bagi pengembangan suatu daerah. Dimulai dengan memilih salah satu tempat wisata dari daerah masing-masing dan diperkenalkan pada peserta lain, keuntungan dan juga dampak negatif yang di akibatkan oleh kehadiran tempat



Foto : Ester Elisabeth Uumbu Tara / INSPIRASI

wisata tersebut. Aktivitas ini menolong kami menyadari bahwa tidak selamanya pariwisata berdampak positif. Kesiapan masyarakat yang ada di daerah wisata sangat penting sehingga wisata yang di bangun berdampak positif terus menerus tidak bersifat sementara. Selain itu, dalam sesi ini di bahas juga tentang bagaimana kuliner lokal dapat menjadi peluang bagi ekonomi masyarakat. Saya sangat tertarik dengan topik ini karena sesuai dengan apa yang ingin saya pelajari yaitu mengembangkan pangan lokal agar berdaya ekonomi bagi masyarakat dan petani yang selama ini di dampingi oleh Yayasan PIKUL.

Kesempatan lain yang kami peroleh yaitu mengunjungi parlemen New Zealand di Wellington dan merupakan pengalaman belajar tentang politik yang berkesan. Kami tidak hanya melihat secara langsung diskusi dan debat antara pemerintah dan partai oposisi, kami juga belajar dan melihat bagaimana sebuah usulan masyarakat dapat diproses menjadi sebuah peraturan.

Masyarakat ikut berpartisipasi aktif melalui petisi, usulan *online* maupun hadir langsung ke parlemen dan berdiskusi dengan anggota dewan lainnya. Dalam kesempatan ini kami juga mengunjungi beberapa anggota dewan yang merupakan pekerja sosial sebelumnya namun terjun ke dunia politik untuk membuat perubahan dari dalam pemerintahan.

Selain itu kami juga bertemu dengan beberapa menteri dan berdiskusi dan berbagi bersama. Sebelum ke parlemen kami dilengkapi dengan pengetahuan dasar mengenai politik di New Zealand dan bagaimana prosedur yang dilalui sehingga terpilihnya perdana menteri saat ini.

Kami juga belajar tentang gerakan-gerakan yang telah dilakukan oleh *First Union* dalam memperjuangkan hak-hak para pekerja, kami belajar tentang hak asasi manusia, di mana ada dua poin penting, yaitu pendekatan berbasis kebutuhan manusia (*human based approach*) atau pendekatan kepada hak seseorang sebagai manusia (*right based approach*). Kedua hal ini mendorong kami untuk melihat lebih jauh pihak-pihak yang kami dampingi untuk bekerjasama, mengidentifikasi kebutuhan sesungguhnya sehingga proyek yang akan dikerjakan menjadi efektif

Di hari terakhir di Wellington kami bertemu dengan Duta Besar Republik Indonesia untuk Selandia Baru, Bapak Tantowi Yahya. Kami berkesempatan memperkenalkan diri kami, organisasi tempat kami bekerja dan apa yang kami lakukan, dan memperkenalkan program INSPIRASI dan kembali menikmati makanan Indonesia yang jarang kami temukan di New Zealand yaitu bakso.



Foto : **Ester Elisabeth Umbu Tara / INSPIRASI**

Perjalanan terakhir yang kami lakukan adalah perjalanan menuju East Cape New Zealand. Bagi saya ini adalah perjalanan budaya, spiritual dan wisata yang lengkap. Kami berkesempatan mengunjungi Te Araroa, kami menginap di Marae, atau rumah yang sakral bagi komunitas Maori. Marae adalah tempat beraktivitas suku Maori, mulai dari perayaan ulang tahun hingga kematian, pertemuan-pertemuan hingga menerima tamu yang datang untuk belajar.

Semua ukiran, anyaman, dan lukisan-lukisan di dalam Marae adalah hasil refleksi mereka terhadap alam sekitar, nenek moyang dan juga Tuhan. Di sini kami berkesempatan berbagi dengan siswa-siswi di salah satu sekolah dimana

kami memperkenalkan Indonesia dan berbagi mimpi. Kami juga mengunjungi kafe di East Cape, salah satu bisnis sosial yang mengembangkan usahanya dengan melihat pada asset yang dimiliki masyarakat sekitar sehingga membuka lapangan pekerjaan bagi mereka.

Kami belajar membuat sabun dari bahan-bahan alami dan membuat produk lainnya yang berasal dari alam sekitar, memasak bersama dan menikmatinya dengan komunitas. Kami juga mengunjungi beberapa pusat wisata di Rotorua, mulai dari yang gratis hingga yang berbayar untuk melihat bagaimana pengembangan dan pengelolaan wisata di tempat itu.

Tentang Program INSPIRASI

Program INSPIRASI (Indonesia Selandia Baru untuk Generasi Muda Inspiratif) adalah program belajar 6 bulan di Selandia Baru yang didukung oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia dan dikelola oleh UnionAID dengan dukungan dari New Zealand Ministry of Foreign Affairs and Trade (MFAT) dan bekerja sama dengan Yayasan Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI) dan Auckland University of Technology (AUT) di Selandia Baru.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Penulis adalah penerima Program INSPIRASI dan dapat dihubungi melalui email elisabethelsa86@gmail.com



Pada 13 Desember 1957, Djuanda Kartawidjaja mendeklarasikan kepada dunia bahwa perairan yang berada di sekitar dan yang menghubungkan pulau-pulau Indonesia merupakan perairan nasional yang berada di bawah kedaulatan Republik Indonesia.

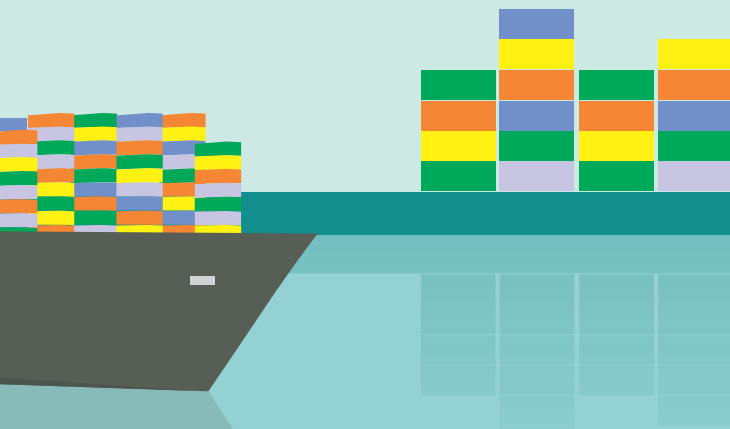
Deklarasi yang dilakukan oleh Perdana Menteri Djuanda tersebut menghebohkan dunia internasional. Kapal dan juga pesawat terbang asing yang selama ini secara leluasa melewati perairan Indonesia, semenjak adanya deklarasi tersebut harus meminta izin kepada Pemerintah Indonesia. Kapal-kapal asing tidak boleh lagi mengambil dan sumber daya laut lainnya yang berada di wilayah perairan Indonesia.

Itulah warisan yang ditinggalkan oleh Djuanda kepada kita. Sebuah kedaulatan teritorial yang didalamnya terkandung kekayaan alam yang luar biasa. Tidak hanya itu, Deklarasi Djuanda juga mengembalikan orientasi kebangsaan kita sebagai bangsa maritim.

Sejalan dengan semangat Djuanda tersebut, Presiden Joko Widodo di tengah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-9 East Asia Summit (EAS) pada 13 November 2014 di Myanmar, mendeklarasikan kepada dunia bahwa Indonesia akan menjadi poros Maritim Dunia. Deklarasi tersebut disampaikan oleh Presiden Jokowi di depan seluruh Kepala Negara/Pemerintahan negara anggota ASEAN, Republik Korea Selatan, Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Jepang, Australia, Selandia Baru, India, Amerika Serikat, Rusia, dan Sekjen ASEAN, Sekjen PBB, dan Presiden Asian Development Bank.

Desain Baru Tata Pemerintahan untuk Mewujudkan Gagasan Poros Maritim Dunia

Oleh **FADEL BASRIANTO**



Ilustrasi : **Frans Gosali**

Semenjak KTT EAS 2014 tersebut, Pemerintah Indonesia telah membangun beberapa proyek infrastruktur untuk mengimplementasikan ambisi menjadi Poros Maritim Dunia. Mulai dengan cara membuka trayek baru Tol Laut, membangun pelabuhan pendukung, dan tak terkecuali penegakan hukum kepada kapal-kapal asing pencuri ikan.

Berbagai aktivitas pembangunan tersebut jika dilihat secara seksama masih didominasi oleh pemerintah pusat. Tidak banyak keterlibatan pemerintah daerah dalam mewujudkan ambisi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Dengan tidak meluasnya pihak yang berpartisipasi, ambisi tersebut sulit untuk diwujudkan sekalipun kita memiliki modalitas geografis yang memadai.

Geografis yang Strategis

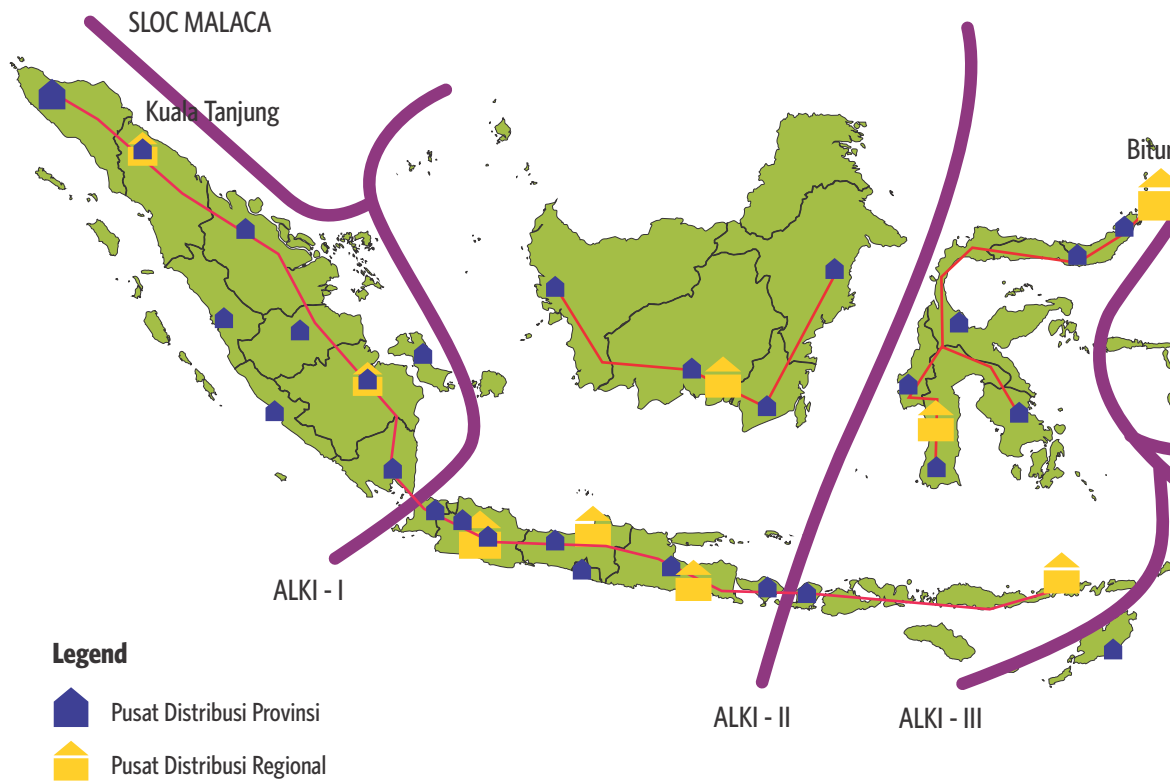
Secara geografis Indonesia memiliki potensi yang besar untuk menjadi poros Maritim Dunia. Indonesia diapit oleh dua benua yakni Benua Australia dan Benua Asia. Selain itu, posisi Indonesia juga berada di tengah antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Dengan kondisi geografis tersebut, Indonesia berpeluang untuk menjadi tempat sandar kapal-kapal yang menuju Samudra Pasifik dari Samudra Hindia atau

sebaliknya. Indonesia juga memiliki garis pantai sepanjang 99.093 kilometer. Angka tersebut merupakan garis pantai terpanjang kedua di dunia setelah Kanada.

Sebagai negara kepulauan yang luas lautannya 70 persen dari total luas wilayah, Indonesia sudah seharusnya menjadi Negara Poros Maritim Dunia. Apalagi Indonesia memiliki tiga Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI). Keberadaan ALKI ini merupakan jalur pelayaran internasional di Indonesia.

ALKI 1 menjadi lintasan kapal-kapal internasional yang berlayar dari Laut Cina Selatan, Laut Natuna, Selat Karimata, Laut Jawa, dan Selat Sunda ke Samudra Hindia, serta sebaliknya. ALKI 2 difungsikan untuk pelayaran dari Laut Sulawesi melintasi Selat Makassar, Laut Flores, dan Selat Lombok ke Samudra Hindia juga sebaliknya. ALKI 3 menjadi lintasan kapal dari Samudra Pasifik yang melintasi Laut Maluku, Laut Seram, Laut Banda, Selat Ombai, dan Laut Sawu.

Dari rute ALKI 1 tersebut terdapat Selat Malaka yang merupakan salah satu selat teramai di dunia. Setidaknya lalu lintas kapal di Selat Malaka berdasarkan pemantauan *Vessel Traffic System* (VTS) mencapai 80.000 sampai 90.000 kapal dalam setahun.



Berniat menjadi poros maritim dunia, artinya meniatkan diri untuk menjadi penggerak maritim dunia.

Tantangan yang Perlu Dipecahkan

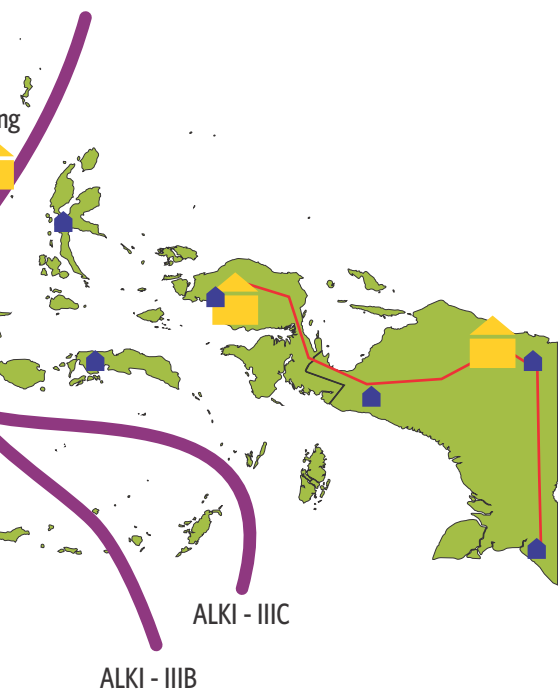
Modalitas geografis tersebut tidak cukup ditunjang dengan pembangunan infrastruktur semata. Untuk mewujudkan gagasan Indonesia sebagai poros Maritim Dunia diperlukan desain tata pemerintahan yang tepat.

Otonomi daerah yang saat ini berlaku telah memberikan ruang otonom kepada pemerintah daerah. Pemerintah daerah memiliki kewenangan yang lebih untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Namun, desain yang ada saat ini tidak

cukup mendorong daerah, terutama yang berada di kawasan pesisir untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Beberapa daerah yang seharusnya mampu menjadi lumbung ikan nasional seperti Kabupaten Kepulauan Talaud, Sangihe, dan Sitaro justru masuk dalam katagori lima kabupaten termiskin di Sulawesi Utara.

Ironi tersebut selain disebabkan oleh tidak tersedianya infrastruktur yang memadai, juga disebabkan desain tata pemerintahan yang tidak mendorong performa pemerintah daerah untuk mengoptimalkan potensi lokal yang ada. Salah satunya disebabkan oleh desentralisasi yang saat ini diberlakukan masih terikat oleh sentralisasi pemerintah pusat melalui penamaan nama-nama dinas.

Presiden melalui PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah malah mempersulit daerah untuk berinovasi sesuai dengan konteks lokalitas yang ada. Melalui PP tersebut, pemerintah pusat yang diwakili oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengatur



Ilustrasi : Dok. The Indonesian Institute (TII)

nomenklatur dinas yang akan mendapatkan dana dari pemerintah pusat. Artinya, nama dinas yang dibentuk oleh daerah, sekalipun itu sesuai dengan kebutuhan daerah yang tidak terdapat dalam daftar nomenklatur yang dikenal oleh Kemendagri, tidak akan mendapatkan bantuan dana dari pemerintah.

Sehingga yang terjadi pengelolaan daerah satu dengan daerah yang lain, sekalipun memiliki karakteristik berbeda, tetap saja dikelola dengan cara yang relatif sama. Misalnya di Kabupaten Semarang, urusan perindustrian diurus oleh Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan. Di Talaud, urusan perindustrian juga diurus oleh dinas dengan nomenklatur yang sama dengan yang terdapat di Kabupaten Semarang.

Padahal sangat memungkinkan jika di Talaud sektor industri langsung ditautkan dengan urusan sumber daya kelautan. Dengan demikian, urusan kelautan akan dikelola oleh Dinas Industri dan Sumber Daya Kelautan. Masih kurangnya

keleluasaan pemerintah daerah dalam mengelola daerahnya sendiri, menjadi salah satu faktor yang menghambat Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Desentralisasi Asimetris untuk Indonesia

Untuk mewujudkan gagasan ide poros maritim dunia, Indonesia tidak cukup hanya dengan membangun infrastruktur fisik semata. Indonesia perlu mendesain tata struktur pemerintahan juga. Diperlukan keberanian lebih untuk menerapkan desentralisasi asimetris. Sebuah tata pemerintahan yang memungkinkan daerah satu dengan daerah lainnya memiliki pemerintahan secara berbeda.

Misalnya, di daerah-daerah pesisir dapat membentuk unit-unit pemerintahan berdasarkan karakter daerah tanpa diikuti oleh terputusnya dana perimbangan pusat-daerah. Sama halnya dengan daerah kepulauan seperti Bali dan Lombok yang dapat lebih menekankan otonominya dalam bidang pariwisata.

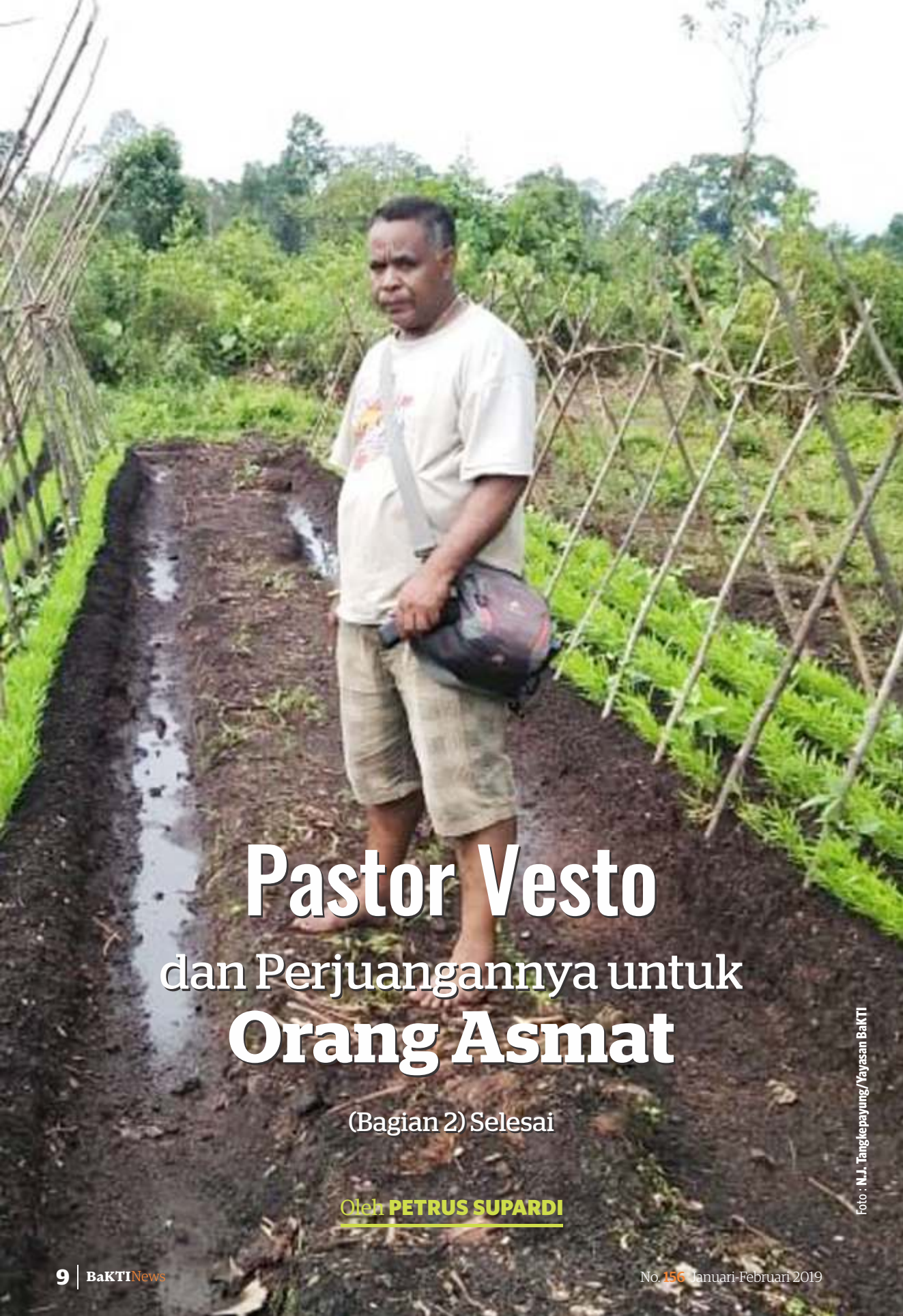
Dengan kata lain, pemberlakuan otonomi daerah yang dimaksud benar-benar berotonomi secara asimetris sesuai dengan konteks lokalitas yang ada. Dengan menerapkan desentralisasi asimetris, poros maritim dunia tidak hanya sekedar proyek pemerintah pusat semata tetapi juga dapat semakin luas karena melibatkan eksponen daerah.

Dengan memberlakukan desentralisasi asimetris tersebut, diharapkan Indonesia benar-benar siap menghadapi Jalur Sutra Abad 21 yang saat ini tengah dibangun oleh Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Indonesia tidak cukup mengandalkan pemerintah pusat untuk siap dengan jalur perdagangan RRT yang sedang berebut pengaruh di Asia Tenggara.

Berniat menjadi poros maritim dunia, artinya meniatkan diri untuk menjadi penggerak maritim dunia. Bukan malah hanya menjadi pasar besar dari negara-negara adidaya. Ambisi ini harus menjadi proyek semesta yang melibatkan semua komponen bangsa agar deklarasi yang disampaikan oleh Djuanda tidak berujung sia-sia.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Penulis adalah peneliti bidang politik The Indonesian Institute (TII) dan dapat dihubungi melalui email fadel@theindonesianinstitute.com

A photograph of a man standing in a muddy field. He is wearing a white t-shirt and khaki shorts, and is holding a black bag. In the background, there is a wooden trellis structure made of sticks, and a dense line of green trees. The ground is dark and muddy, with some water puddles.

Pastor Vesto dan Perjuangannya untuk Orang Asmat

(Bagian 2) Selesai

Oleh **PETRUS SUPARDI**

Foto : N.J. Tangkepung/Vayasan BaKTI



Foto : N.J. Tangkepayung/Yayasan BaKTI

Awal Januari 2018, Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit campak dan gizi buruk melanda Asmat. Sebanyak 72 anak berumur kurang dari lima tahun meninggal dunia. KLB tersebut menjadi berita nasional bahkan internasional dan diliput berbagai media.

Setahun yang lalu tepatnya di akhir Januari 2018, LANDASAN Papua menggelar Pelatihan Tupoksi bagi aparat kampung di distrik Akat. Kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Pastor Vesto untuk mengungkapkan harapannya agar LANDASAN Papua juga bisa masuk ke Distrik Akat.

Ketika berita tentang KLB campak dan gizi buruk semakin meluas, Tim KOMPAK - LANDASAN II bertemu dengan Wakil Bupati Asmat, Thomas Eppe Safanpo dan menyatakan rencana kegiatan terkait penanganan pasca KLB campak dan gizi buruk serta rencana LANDASAN untuk memperluas daerah implementasi program ke Distrik Akat dan Atsj. Akan tetapi, Wakil Bupati Asmat masih meragukan rencana tersebut, mengingat masyarakat di distrik Akat masih tertutup dan beberapa program pembangunan belum berjalan secara efektif.

Keraguan tersebut dijawab oleh Pastor Vesto. Beliau mengantar Tim LANDASAN mengunjungi Distrik Akat dan melihat langsung kondisi Puskesmas Ayam dan SD YPPK St. Martinus de Pores Ayam. Setelah kunjungan tersebut, Pastor Vesto yakin harapannya dapat terwujud. Pastur yang ditahbiskan menjadi Imam Gereja Katedral Salib Suci Agats pada 14 Agustus 2011 ini yakin suatu saat program LANDASAN akan masuk ke Distrik Akat.

Penantian panjang Pastor Vesto terjawab. Hari itu, Selasa, 20 Maret 2018, Kedutaan Besar Australia dan tim KOMPAK LANDASAN Papua tiba di Ayam, Distrik Akat. Suasana gembira dan haru membaur, menyatu bersama alam semesta dan leluhur orang Asmat di Akat.

Kunjungan Kedutaan Besar Australia dan KOMPAK LANDASAN diikuti pula dengan kehadiran Kordis Akat, Arita Adelheid M. Orinbao pada pertengahan April 2018. Proses pendampingan di unit layanan kampung, sekolah dasar, Puskesmas dan HIV-AIDS mulai berjalan sejak kehadiran Arita di sana.

Pastor Vesto selalu menunjukkan komitmen berjalan bersama LANDASAN. Dirinya selalu menyempatkan untuk hadir di setiap kegiatan LANDASAN, baik yang dilaksanakan di Ayam



Foto : N.J. Tangkepayung/Yayasan BaKTI

maupun di Akat. “Saya bilang ke teman-teman Pastor, LANDASAN datang untuk bantu para Pastor. Program yang dilaksanakan di kampung, sekolah dasar, Puskesmas, HIV-AIDS oleh LANDASAN ini erat kaitannya dengan pelayanan pastoral. Karena itu, para Pastor harus mendukung,” tuturnya bersemangat.

Pada tanggal 17-23 Mei 2018, LANDASAN Papua menggelar pelatihan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di aula Kantor Distrik Akat. Peserta yang hadir berasal dari kepala sekolah dasar, guru operator, komite sekolah dan kepala kampung. Peserta berasal dari 8 sekolah dasar dan 1 sekolah menengah pertama.

Pastor Vesto mengurus segala persiapan. Dirinya bersama Kordis Akat, Aritas Adelheid M. Orinbao mengantar undangan ke kampung-kampung di luar pusat Distrik Akat. Keduanya membutuhkan waktu dua hari untuk menjangkau enam kampung di luar Distrik Akat.

Selama pelatihan SPM dan MBS di Distrik Akat, Pastor Vesto sendiri memastikan ketersediaan penginapan peserta, makan dan minum. Setiap

pagi, ia lebih awal hadir di aula. Ia memastikan bahwa pelatihan harus berjalan lancar. Pada sore hari, ia pulang paling akhir, setelah peserta kembali ke rumah masing-masing. Ia berharap setelah mengikuti pelatihan SPM dan MBS para guru bisa menerapkannya di sekolah masing-masing.

Pelatihan SPM dan MBS di Distrik Akat mulai menampilkan hasil. SD YPPK St. Martinus de Pores Ayam langsung melakukan revitalisasi Komite Sekolah. Kepala Sekolah, Herlina Silubun membenahi ruang Perputakaan. Data guru terpampang rapi di ruang guru.

Selain SD YPPK Martinus de Pores Ayam, SD YPPGI Ayam pun langsung berbenah. Sekolah yang sebelum kehadiran LANDASAN ditumbuhi rumput sudah bersih dibabat oleh pemuda kampung. Sedangkan pelatihan SOP Non Teknis dan RUK untuk Puskesmas Akat dan Atsj dilaksanakan tanggal 8-12 Mei 2018. Selesai pelatihan, Puskesmas Ayam langsung menggelar rapat. Kepala Puskesmas Ayam, Teguh Sunarto mengkoordinir stafnya menyusun SOP, membuat struktur dan juga alur layanan Puskesmas Ayam.



Foto : N.J. Tangkepuyung/Yayasan BaKTI

Sedangkan di tingkat kampung, sejak kehadiran Kordis Akat, Arita di Ayam pada bulan April 2018, proses sensus penduduk berbasis SAIK sudah dimulai. Pastor Vesto dan Arita bergerak cepat. Keduanya ke kampung-kampung dan bertemu dengan kepala kampung untuk pemilihan kader kampung. Hasilnya, setiap kampung memilih dua orang kader. Arita langsung mendampingi proses pengisian form sensus yang berbasis SAIK. Kini, Seluruh kampung yang berada Distrik Akat telah selesai melakukan sensus berbasis SAIK.

Pastor Vesto telah membuktikan bahwa orang Asmat bisa membangun kampungnya. Mereka hanya perlu dilatih dan didampingi. Ia mempersembahkan seluruh hidupnya untuk pelayanan kemanusiaan bagi orang Asmat dengan tidak membedakan asal suku, marga, dan agama. Semua umat di Distrik Akat dilayaninya dengan senang hati.

Ia tidak memiliki dana operasional yang besar. Hanya berbekal satu *speed boat* dengan mesin *mercury* tua yang sering rusak dan macet di perjalanan, ia mengunjungi warga sampai ke

dusun dan bevak. Pernah sekali, beliau terkatung-katung di tengah sungai hingga empat jam karena mesin perahunya rusak. Beliau sempat menuturkan harapannya untuk mendapatkan mesin perahu yang baru agar bisa menjangkau kampung-kampung yang lebih jauh.

Pastor Vesto mengungkapkan bahwa kehadiran LANDASAN Papua di Distrik Akat sangat membantu dirinya dalam menjalankan tugas pelayanan pastoral. Sebab apa yang dikerjakan LANDASAN sejalan dengan pelayanan pastoral dalam bidang pemberdayaan kampung, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi masyarakat.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang Program KOMPAK - LANDASAN II dapat menghubungi email info@bakti.or.id



Berita dengan Perspektif Perempuan dan Anak

Oleh **M. GHUFRAN H. KORDI K.**

Memperingati Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (HAKtP) 2018, Yayasan BaKTI meluncurkan buku Panduan Jurnalis Berperspektif Perempuan dan Anak. Sebuah diskusi diadakan pada 27 November 2018 untuk membahas seperti apa tulisan yang mengandung perspektif perempuan dan anak.

Diskusi yang diadakan pada 27 November 2018 di Ruang AS Room Kantor BaKTI menjadi bagian dari kegiatan Inspirasi BaKTI yang dirangkaikan dengan Peringatan Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan (HAKtP) 2018. Buku Panduan Jurnalis Berperspektif Perempuan dan Anak menjadi dipilih referensi diskusi.

Hadir sebagai narasumber dalam diskusi adalah Qodriansyah Agam Sofyan dan Sunarti Sain. Qodriansyah Agam Sofyan yang akrab dipanggil Agam adalah salah satu penulis panduan tersebut Sunarti Sain yang kerap disapa Una, adalah Pemimpin Redaksi Harian Radar Selatan, seorang jurnalis senior dan aktivis perempuan dan anak di Makassar.

Diskusi yang dipandu oleh Luna Vidya dihadiri oleh para jurnalis, aktivis perempuan dan anak,



Foto : Sherly Heumasse /Yayasan BaKTI

(Foto Kiri) Qodriansyah Agam Sofyan dari AJI bersama Sunarti Sain yang merupakan jurnalis senior dan aktivis perempuan dan anak menjelaskan bagaimana media selama ini menjadikan perempuan dan anak sebagai obyek berita yang menimbulkan cukup banyak kerugian bagi perempuan dan anak.

organisasi sosial dan keagamaan, dan pemerintah. Membuka Diskusi, Luna Vidya menjelaskan bahwa, Yayasan BaKTI memilih mendiskusikan panduan tersebut sebagai bagian dari Peringatan HAKtP 2018, dimana tahun ini memilih tema “Gerak Bersama untuk Pencegahan Perkawinan Anak” dengan mengkampanyekan “Pelaminan Bukan Tempat Bermain Anak.”

Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan tahun ini mengkampanyekan gerakan 'Pelaminan Bukan Tempat Bermain Anak'. Gerakan ini penting untuk didukung oleh semua pihak, termasuk para jurnalis melalui aktivitas pemberitaan. Diskusi membahas bagaimana jurnalis dapat berkontribusi untuk mencegah perkawinan anak, bahkan secara lebih luas lagi turut mendukung dan mengembangkan jurnalisme yang mempunyai perspektif perempuan dan anak.

Tidak Asal Bisa

Memulai presentasinya, Agam menjelaskan bahwa Sulawesi Selatan adalah salah satu provinsi dengan angka perkawinan anak tinggi. Indonesia juga dinyatakan darurat perkawinan anak. Parahnya ketika ada anak-anak yang menikah malah menjadi berita di berbagai media, baik media mainstream (arus utama) maupun media sosial.

Anak-anak yang menikah ditampilkan di acara-acara televisi sehingga tampak seperti sebuah

kebanggaan. Perkawinan anak bahkan sempat menjadi trending topik di media sosial. Padahal seharusnya yang perlu diberitakan adalah dampak negatif perkawinan anak termasuk kerugian apa saja yang diderita anak dari perkawinan anak tersebut.

Agam menjelaskan lebih lanjut, bahwa di luar perkawinan anak, media juga menjadikan perempuan dan anak sebagai obyek berita yang menimbulkan cukup banyak kerugian bagi perempuan dan anak. Perempuan dan anak ditempatkan sebagai pihak yang terhukum. Dalam pemberitaan tentang pemerkosaan perempuan dan anak, yang digambarkan adalah bagaimana pakaian perempuan, jam berapa diperkosa dan kronologis kejadian. Ini menimbulkan pertanyaan, kenapa media tidak lebih lugas dalam mengangkat motif pelaku pemerkosaan dan menerangkan betapa kejinya perbuatan tersebut.

Fakta tersebut di atas yang melahirkan keinginan kuat untuk menuangkan perspektif perempuan dan anak dalam pemberitaan dan mendorong Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dalam bekerjasama dengan Program MAMPU (Kemitraan Australia Indonesia untuk Kesenjangan Gender dan Pemberdayaan Perempuan) dan Yayasan BaKTI mengembangkan Panduan Jurnalis Berperspektif Perempuan dan Anak. Panduan tersebut diharapkan dapat berguna bagi jurnalis dan masyarakat pengguna media sosial dalam menulis dan membagikan berita dan foto. Dengan



Foto : Sherly Heumasse /Yayasan BaKTI

Di luar perkawinan anak, media juga menjadikan perempuan dan anak sebagai obyek berita yang menimbulkan cukup banyak kerugian bagi perempuan dan anak.

begitu, kita berharap orang tidak asal bisa menulis, bisa membuat berita, dan memposting, tapi menulis dengan perspektif dan hati.

Soal Perspektif

Penulisan berita oleh jurnalis berhubungan dengan perspektifnya terhadap suatu hal. Demikian pengantar dari Una saat memulai presentasinya. Sementara perspektif itu bukan sesuatu yang langsung jadi, melainkan harus dipelajari dan dipraktikkan.

Bagi seorang aktivis perempuan dan anak yang berpengalaman tentu mempunyai pemihakan yang jelas karena perspektif dan aktivitasnya sudah teruji bertahun-tahun. Namun seorang wartawan yang masih baru, biasanya cenderung melaporkan berita sesuai dengan fakta. Apa yang dia lihat dan kemudian dia persepsikan sendiri sesuai dengan pengalaman dan pengetahuannya

yang relatif masih minim. Walaupun apa yang dituliskan itu memang fakta namun tanpa perspektif yang tepat terhadap perempuan dan anak, tulisannya dapat sangat merugikan mereka karena menempatkan perempuan pada posisi terhukum. Tulisan tentang sebuah fakta bukanlah sesuatu yang bebas perspektif karena apa yang ditulis juga dipengaruhi adalah sudut pandang dan pemikiran seseorang. Seorang jurnalis yang melaporkan sebuah fakta, sudah barang tentu juga memiliki persepsi.

Jurnalis yang tidak mempunyai perspektif perempuan, anak, gender, penyandang disabilitas, dan kelompok minoritas, tentu memiliki persepsi sendiri saat melaporkan dan menjelaskan fakta. Dalam masyarakat patriarki, seperti di Indonesia, perspektif jurnalis umumnya adalah perspektif patriarkis yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang kuasa dan kebenaran.

Jurnalisme Advokasi

Kedua narasumber sepakat agar jurnalis tidak sekadar memberitakan apa yang terjadi, tapi juga harus memberitakan sesuatu yang mencerahkan, memberitakan sesuatu yang dapat mengubah kondisi menjadi lebih baik. Menanggapi beberapa pertanyaan dalam diskusi, lebih jauh Agam menjelaskan, “Jurnalis bisa mengambil posisi untuk mendorong pemerintah melakukan perbaikan pelayanan, meningkatkan anggaran untuk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, mendorong bahkan memengaruhi polisi untuk memberikan



Foto : Sherry Masasse / Yayasan BaKTI

perlindungan bagi korban perempuan dan anak, menggunakan istilah-istilah yang lebih baik, tidak menghukum korban.”

Sementara menurut Una, jurnalis adalah salah satu profesi yang dapat mencerahkan, sekaligus dapat merugikan kelompok-kelompok lain, bahkan ikut mendiskriminasi kelompok yang minoritas. Mungkin si jurnalis tidak sadar bahwa, berita yang ditulis atau yang diberitakan itu akan merugikan pihak lain, seperti perempuan dan anak. Mungkin juga jurnalis beranggapan bahwa apa yang dilakukannya adalah tugasnya, dan kemudian dia tidak ikut bertanggungjawab terhadap dampak lain. Namun jika si jurnalis menyadari bahwa pekerjaannya adalah profesi yang dapat mengubah orang, memperbaiki orang lain, menyelamatkan orang lain, atau meningkatkan kualitas hidup banyak orang, maka tentu dia akan melakukannya dengan serius.

Jurnalis Berperspektif Perempuan dan Anak

Jurnalis adalah pekerjaan yang membentuk persektif atau pandangan orang lain. Berita yang dibaca, didengar, atau ditonton, oleh sebagian orang akan menerimanya seperti itu dan dianggapnya sebagai sesuatu yang benar. Artinya, jika tulisan atau berita yang disampaikan berisikan informasi yang mencerahkan dan mengubah orang menjadi lebih baik, tentu menjadi sesuatu yang diharapkan.

Berita yang disajikan ke publik akan diterima dan diolah oleh publik. Dalam penerimaan publik tersebut terjadi perebutan dan pertarungan

berbagai ideologi dan kekuasaan. Media-media besar dan jurnalis-jurnalis yang mempunyai perspektif akan membentuk opini dan mengubah perspektif publik. Tentu harapannya adalah membentuk opini ke arah yang lebih manusiawi dan bermartabat.

Perempuan dan anak sampai saat ini masih dianggap sebagai isu yang tidak populer dan mungkin 'tidak menjual'. Karena itu, pemberitaan yang berhubungan dengan perempuan dan anak masih selalu berkulat pada isu-isu yang membuat heboh. Kasus perkawinan anak dibuat menjadi berita heboh, bahkan jurnalis dan media dengan bangga menampilkannya. Unsur apa yang hendak ditampilkan pun tidak jelas. Apa yang berguna bagi publik dengan pemberitaan perkawinan anak seperti itu?

Sudah saatnya, jurnalis dan semua orang yang menulis dan membagi apa pun di media sosial, saatnya kritis bahwa, perempuan dan anak harus ditampilkan sebagai subyek berita yang menjadikan perempuan dan anak sebagai manusia. Tulisan dan berita tidak menjadikan atau menempatkan perempuan dan anak sebagai korban dan pihak terdampak. Berita perempuan dan anak harus harus mendidik, mencerdaskan dan mengubah kehidupan perempuan dan anak menjadi lebih baik.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Untuk mengetahui informasi lebih lanjut mengenai Program MAMPU-BaKTI, dapat menghubungi email info@bakti.or.id



Pemantauan dan Penilaian PKSAI Kota Makassar dan Kabupaten Gowa

Oleh **ARAFAH**

Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PKSAI) Kota Makassar dan Kabupaten Gowa telah berjalan lebih dari dua tahun. Untuk mendukung kerja PKSAI Kota Makassar dan Kabupaten, Kementerian Sosial bekerja sama dengan Pemerintah Kota Makassar dan Kabupaten Gowa, melalui dukungan UNICEF dan Yayasan BaKTI mengembangkan sebuah model layanan kesejahteraan sosial anak.

Model layanan yang diselenggarakan secara terarah, terpadu dan berkelanjutan ini bertujuan mencegah terjadinya hambatan dan gangguan pemfungsian sosial pada anak



Foto : Arafah /Yayasan BaKTI

dan keluarganya, memulihkan dan mengembangkan fungsi sosial anak, keluarga, dan lingkungan sosialnya sehingga anak tumbuh kembang secara optimal.

PKSAI Kota Makassar dan Kabupaten Gowa dikembangkan melalui enam komponen. Komponen pertama adalah kebijakan yang berupa payung hukum di tingkat pusat dan daerah tentang PKSAI yang mengatur kelembagaan, pelayanan, mekanisme kerja, dan pengalokasian sumber daya. Komponen kedua adalah kelembagaan yang menjamin keberadaan dan kelangsungan pelayanan, menetapkan tim teknis pelaksana PKSAI, penganggaran, dan sekretariat.

Komponen ketiga pengembangan PKSAI adalah mekanisme kerja yang meliputi prosedur internal dan eksternal, SOP, koordinasi, standar pelayanan, supervisi, survei kepuasan layanan. Sedangkan komponen keempat mencakup layanan. Ini termasuk ketersediaan rentang layanan yang meliputi layanan pencegahan, intervensi dini, dan penanganan kasus.

Adapun komponen kelima PKSAI Kota Makassar dan kabupaten Gowa adalah sumber

daya manusia yang memiliki kapasitas untuk menjalankan peran, fungsi, dan tanggung jawab sebagai koordinator sekaligus supervisor, penerima pengaduan dan registrasi, pekerja sosial, petugas administrasi, petugas data, penyedia layanan, petugas yang ditetapkan oleh lembaga layanan, serta jumlah dan kompetensi SDM yang memadai.

Komponen terakhir yang mendukung pengembangan PKSAI Kota Makassar dan Kabupaten Gowa adalah Sistem Manajemen Data dan Informasi; ketersediaan database mutakhir yang menyediakan data dasar kesejahteraan anak sebagai basis perencanaan, penganggaran, dan penyelenggaraan layanan, ketersediaan sistem informasi untuk memudahkan pelaksanaan manajemen kasus. Sistem manajemen data juga diharapkan dapat terkoordinasi dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, Ketersediaan SOP manajemen data dan informasi yang menjamin keamanan dan kerahasiaan data. Tersedianya perangkat yang menunjang penerapan sistem informasi PKSAI dan diseminasi hasil analisa data untuk koordinasi dan kebutuhan lainnya.

UNICEF melalui Yayasan BaKTI melakukan pemantauan partisipatif dengan berbagai pemangku kepentingan yang berasal dari Dinas dan instansi terkait untuk menilai capaian penyelenggaraan PKSAI di Kota Makassar dan Kabupaten Gowa. Pemantauan dilakukan menggunakan alat monitoring *score card* untuk menilai keenam komponen PKSAI.

Penilaian Komponen

Kartu skor disusun untuk membantu memonitor perkembangan penyelenggaraan model layanan anak integratif melalui 6 komponen utama PKSAI. Masing-masing kondisi ini memiliki nilai yang kemudian ditransformasikan dalam bentuk persentase.

Kegiatan monitoring dimulai dengan langkah pertama dimana peserta monitoring mendiskusikan pilihan mereka dalam kelompok kecil. Hasil diskusi kelompok kecil kemudian didiskusikan di kelompok besar bersama alasan dan pertimbangannya. Selain itu, *feedback* untuk mengembangkan *score card* ini juga diskusikan.

Hasil pemantauan dengan *scorecard* menunjukkan PKSAI Kota Makassar mendapatkan skor pencapaian 72.4% sedangkan skor pencapaian Gowa yaitu 72.8%. Dari 6 komponen penilaian ini, yang memiliki bobot penilaian yang cukup baik adalah pada komponen 1 dan 2. Pada saat *baseline* komponen 1 berada



pada posisi 0%, setelah 2 tahun, komponen ini mencapai 100%. Komponen 2 juga mengalami peningkatan yang sangat signifikan dari 38,9% (Gowa), Makassar 16,7% saat *baseline* menjadi 100%.

Area penilaian adalah diberlakukannya kebijakan dan peraturan dalam pendirian layanan PKSAI. Apakah ada peraturan sub-nasional pada tingkat Kabupaten/Kota yang menjadi payung hukum untuk mengembangkan layanan kesejahteraan sosial terpadu, misalnya Peraturan Walikota atau Peraturan Bupati. Peraturan sub-nasional menjadi payung hukum dalam menjamin pelaksanaan kesejahteraan dan perlindungan anak yang menguraikan struktur, alokasi anggaran, dan mekanisme koordinasi.

Pada poin 2 area yang dinilai yaitu rentang layanan yang tersedia yaitu dari sisi penyedia layanan dan sisi kebutuhan. Misalnya layanan pencegahan primer, dan sekunder serta layanan respon tersier untuk anak dan keluarga.

Komponen utama lainnya yang memiliki progres yang cukup baik yaitu struktur organisasi 15,7% untuk PKSAI Makassar dan PKSAI Gowa 13,9%. Faktor yang dinilai yakni, Kelembagaan; struktur kepemimpinan; apakah pemerintah kabupaten/kota memimpin pengembangan dan pelaksanaan layanan.

Tanggung jawab dan peran setiap agen yang terlibat didefinisikan dengan jelas. Fungsi manajemen; perencanaan bersama antara BAPPEDA dengan Dinas Sosial dan Dinas

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk alokasi penganggaran dan operasional. Kapasitas pendanaan: pendanaan siklus saat ini dan siklus selanjutnya. Kemudian disusul oleh komponen mekanisme dan protokol operasional, PKSAI Makassar pada level 10,0%, PKSAI Gowa 12,2%. Hal yang dinilai yaitu; mekanisme kerja, misalnya mekanisme untuk mengidentifikasi, merujuk, dan memberikan intervensi untuk anak dalam situasi rentan dan beresiko. Praktik manajemen kasus, dan struktur, koordinasi lintas sektoral untuk model kesejahteraan dan perlindungan anak terpadu.

Komponen lainnya yang masih kecil yaitu kapasitas sumber daya manusia 7,8% PKSAI Makassar dan Gowa. Komponen kapasitas sumber daya manusia ini mencakup Satuan Bakti Pekerja Sosial, pekerja sosial lain, pekerja *frontline* lainnya, manajer layanan, dan pendukung operasional.

Komponen capaian terendah yaitu sistem manajemen data dan mekanisme pemantauan dengan nilai 5,6%. Unsur yang dinilai pada manajemen data dan akuntabilitas yakni sistem pengelolaan data untuk layanan terkait bagi anak dan keluarga rentan.

Pihak yang Terlibat

Kegiatan monitoring dan evaluasi PKSAI Kota Makassar dan kabupaten Gowa dilakukan pada tanggal 23 dan 26 November 2018. Peserta kegiatan terdiri dari unsur Dinas Sosial Provinsi,



Foto : Arafah /Yayasan BaKTI

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sulsel, organisasi perangkat daerah yang terkait dari Kota Makassar dan Kabupaten Gowa termasuk Bappeda, Dinas Sosial, Kesehatan, Pendidikan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dukcapil, RSUD Daya, Rumah Sakit Bhayangkara, RSUD Syech Yusuf, Tim PKSAI, Sakti Peksos, Fasilitator SLRT dan PKH.

Dalam catatan dan materi monitoring dan evaluasi yang disampaikan oleh Muhammad Amri, Kepala Bidang Sosial Budaya, BAPPEDA Kota Makassar sebagai focal point PKSAI diketahui bahwa pelayanan PKSAI masih berjalan sendiri-sendiri sesuai tupoksi organisasi perangkat daerah. Antara organisasi perangkat daerah dan pekerja sosial masih bergerak dan menentukan sendiri layanan apa yang diberikan kepada anak rentan.

Selain itu, kegiatan *case conference* dengan SKPD serta lintas sektor dan lembaga layanan masih belum optimal. Pendekatan layanan sekunder dengan menggunakan basis data terpadu masih belum optimal dikerjakan.

Belum ada program atau kegiatan yang dihimpun dalam terlihat jelas yang dapat mendukung PKSAI, belum optimal pendekatan layanan sekunder dengan menggunakan basis data terpadu, dan belum optimal pemanfaatan sistem informasi manajemen PKSAI.

Rekomendasi Pengembangan PKSAI

Melalui kegiatan pemantauan dan penilaian PKSAI ini, peserta menyampaikan beberapa rekomendasi untuk memperkuat PKSAI menjadi layanan kesejahteraan sosial anak yang holistik, integratif, dan berkelanjutan. Poin rekomendasinya yakni sebagai berikut.

Perlu ada strategi PKSAI yang terarah, terpadu, koordinatif, komprehensif dan berkelanjutan. Strategi Pengembangan PKSAI dapat dilakukan antara lain dengan cara pemetaan program kegiatan yang ada dalam APBD yang mendukung program PKSAI untuk dokumen Rencana Aksi Daerah sehingga terarah dengan baik intervensi yang akan dilakukan. Organisasi Perangkat Daerah melakukan layanan rentang anak secara terpadu melalui *case conference* jika diperlukan sehingga dampaknya anak rentan akan mendapatkan program yang lebih banyak. Membangun kebiasaan koordinatif yang produktif dalam melakukan intervensi layanan bagi semua pihak baik secara kontinyu maupun secara insidental sehingga terjalin koneksitas antar SKPD, lembaga, LSM. Peningkatan layanan penjangkauan sekunder secara aktif dengan pemanfaatan data yang bersumber dari Basis Data Terpadu (BDT) kepada semua SKPD dalam melakukan pemberian layanan anak yang rentan. Pemanfaatan teknologi informasi yang mendukung pelayanan PKSAI sehingga keberlanjutan program dapat dicapai secara optimal.

Stakeholder perlu mengembangkan dan melaksanakan sistem perlindungan anak, sehingga ada keterpaduan antar *stakeholder* dalam bekerja, sehingga potensi tumpang tindih kegiatan/layanan dapat dihindari. Dapat diidentifikasi kesenjangan dalam pemberian layanan untuk pemenuhan hak anak maupun perlindungan khusus bagi anak. Dapat ditingkatkan koordinasi antar *stakeholder* pusat dan daerah, termasuk koordinasi dalam pendataan dengan melibatkan masyarakat, dunia usaha, media massa dan perguruan tinggi. Selain itu, pemerintah perlu memberikan dukungan secara maksimal dan terintegrasi untuk mencapai target 100% capaian PKSAI.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Untuk mengetahui informasi lebih lanjut mengenai Program UNICEF - BaKTI dapat menghubungi email info@bakti.or.id

Rinding Allo

Matahari di antara Dua Dinding

Oleh **M. YUSUF WEANDARA**

Desa Rinding Allo adalah desa yang diapit oleh dua gunung. Gunung Tabuan di sebelah Timur dan Gunung Paraméan di sebelah Barat. Saat Matahari terbit cahayanya terhalang oleh Gunung Tabuan dan saat terbenam cahayanya hilang dibalik Gunung Paraméan.



Foto : Yusuf Weandara



Foto : Yusuf Weandara

T erik matahari membuat perjalanan ini semakin berat. Waktu menunjukkan pukul 10:12 Wita. Sepertinya waktu istirahat telah berakhir. Saya harus melanjutkan perjalanan menuju ke desa tujuan.

Kali ini perjalanan saya menuju ke Desa Rinding Allo Kecamatan Rongkong Kabupaten Luwu Utara. Motor yang terparkir lesu seakan berbisik kepadaku “saya sudah capek bos, lanjut besok yah...”. Wajar saja, perjalanan 2 jam terakhir ini melewati medan yang cukup berat. Sepertinya tak ada tanah datar yang dilewati, hanya tanjakan dan tanjakan. Beruntung cuaca sedang tidak hujan, jadi motor tidak tertanam dalam kubangan lumpur. Hanya saja debu yang beterbangan menghalangi pandangan dan mengganggu pernapasan.

Kondisi jalan membelah hutan tropis, menyisir lereng berbatas jurang dan sungai, melihat keindahan air terjun yang menempel di tebing, barisan sawah terasering yang rapi memapas lereng, rumah-rumah penduduk yang nampak seperti titik putih dari kejauhan dan bertemu dengan kawanan hewan liar penghuni hutan adalah beberapa hal yang membuat saya tidak hentinya berdecak kagum. Jari ini tak hentinya bermain dengan kamera telepon

genggam memaksimalkan gambar yang terekam memaksa kemampuan kamera hingga batas terbaiknya agar gambar yang terekam bisa terlihat seperti mata yang memandang ke alam nyata.

Ada saat-saat dimana saya merasa takut untuk melihat beberapa bagian dari daerah yang saya lewati. Kondisi gunungnya yang telah gundul di beberapa bagian akibat pembukaan lahan entah itu untuk sarana pemukiman atau untuk bercocok tanam membuat peluang terjadinya bencana alam terbuka lebar. Namun, Apapun tujuannya, sebaiknya ada upaya edukasi dari pemerintah setempat agar masyarakat bisa mengetahui dan memahami arti pentingnya menjaga ekosistem lingkungan hidup. Misalnya saja dalam bentuk sosialisasi ataupun penyuluhan, agar dampak negatif dari pembukaan lahan tersebut bisa dicegah. Pada prinsipnya pembukaan lahan untuk pemukiman dan bercocok tanam adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari, sebab itu menjadi kebutuhan mendasar sebagai manusia dan sebagai masyarakat petani. Namun terdapat metode-metode yang dapat diterapkan agar dampak pembukaan lahan tersebut bisa diminimalisir atau bahkan dihilangkan. Dalam hal inilah peran pemerintah sangat dibutuhkan untuk membangun paradigma masyarakat bagaimana mencintai lingkungannya.



Foto : Yusuf Weandara

Desa diantara Dua Dinding

Waktu menunjukkan pukul 12:13 Wita. Tanjakan yang saya lewati terasa panjang dengan kondisi mesin motor yang terasa sangat panas akibat silinder yang terpacu lama dengan beban dan *track* yang nanjak. Sesekali kedua kaki ini harus diturunkan untuk membantu motor berjalan menapaki bebatuan besar yang berserakan di jalan. Setelah empat jam lebih perjalanan dari Kota Masamba dengan perjuangan yang berat saya kemudian memasuki wilayah Desa Rinding Allo. Desa yang diapit oleh dua gunung ini sungguh elok dipandang. Mungkin dari semua tempat yang pernah saya datang hanya tempat ini dan Danau Sentani di Papua yang membuat saya betah berlama-lama memandangnya.

Rumah-rumah kayu khas Sulawesi berdiri indah di kelilingi petak-petak sawah yang tersusun rapi. Beberapa petani nampak beraktifitas di sawah bersama kerbau dengan tanduknya yang melengkung yang ujungnya nyaris bertemu satu sama lain. Cahaya matahari yang muncul dari celah awan nampak jelas menyinari desa ini. Ibarat lukisan dengan cahaya mataharinya yang menyorot petani di sawah. Jalan-jalan desa nampak jelas menghubungkan dusun satu ke dusun lainnya dan bunga-bunga warna-warni yang tumbuh liar di sekitar jalan menambah

khidmat mata ini memandang. Belum lagi kabut tipis yang selalu menutupi dua puncak gunung yang menjadi dinding desa ini.

Desa Rinding Allo secara administratif terletak di Kecamatan Rongkong Kabupaten Luwu Utara. Adapun batas-batas desanya di sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Limbong, sebelah selatan Desa Lodang, sebelah barat Desa Embonatana dan sebelah timur berbatasan dengan Desa Minanga. Secara morfologi nama Rinding Allo terdiri dari dua suku kata yaitu Rinding yang berarti dinding dan Allo yang berarti Matahari. Secara harfiah kata Rinding Allo berarti 'Dinding Matahari' dan secara makna berarti desa yang diapit oleh dua gunung yang cahayanya selalu terhalang baik saat terbit maupun saat terbenam.

Mayoritas penduduk di desa ini bersuku Rongkong. Suku yang masih asing di benak saya mengingat suku-suku yang saya ketahui di Sulawesi Selatan hanya ada Makassar, Bugis, Toraja, Mandar, Luwu, dan Duri. Sewaktu saya berkunjung, desa ini masih dipimpin oleh seorang pejabat sementara sebab kepala desa yang lalu telah lebih dulu wafat. Desa Rinding Allo terdiri dari enam dusun yaitu Dusun Kawalean, Dusun Buntu Malabbi, Dusun Manganan, Dusun Pambuntang, Dusun Salurante dan Dusun

Mabusa. Kepala Keluarga di desa ini berjumlah 205 kepala keluarga dan bertani sebagai profesi yang paling dominan hanya sebagian kecil saja yang bekerja sebagai pegawai.

Sawah di desa ini dikelola dengan model terasering dan panen sekali dalam setahun. Hasilnya pun hanya untuk memenuhi kebutuhan keluarga, jika ada lebih, akan dibarter dengan kebutuhan lainnya. Sumber pendapatan lain berasal dari kegiatan Matekke. Matekke adalah kegiatan membawa barang-barang kebutuhan pokok dengan menggunakan kuda untuk di barter di tempat lain. Biasanya orang-orang di desa ini membawanya ke Seko. Barang-barang kebutuhan pokok dibeli di Sabbang, kemudian dengan menggunakan kuda barang-barang tersebut akan diangkut menuju desa ke tetangga untuk dibarter. Barang-barang yang ditukarkan seperti kopi dan kakao dan hasil-hasil kebun lainnya.

Kondisi Sosial Masyarakat

Facilitas desa terdiri dari Kantor Desa Rinding Allo, Kantor Polisi Sektor Rongkong, Balai Penyuluhan Pertanian dan UPT SD Negeri 060 Manganan. Untuk penerangan, desa ini telah memiliki pembangkit listrik sendiri. Pembangkit listrik tenaga air yang gardu turbinnya berada di Desa Salorante. Pembangkit listrik ini dipasang sekitar tahun 2015. Listrik menyala pada malam hari saja, kecuali untuk hari Kamis sore sampai Sabtu pagi. Hal ini sebagai bentuk apresiasi di hari Jumat. Pembayaran listrik dilakukan dengan sistem iuran perbulan sebesar 40 ribu per rumah. Sekolah Dasar di desa ini adalah sekolah induk kecamatan namun kondisi fisiknya masih jauh dari kata layak. Kiranya pemerintah setempat masih perlu meninjau fisik beberapa sekolah yang ada di kecamatan ini dan mungkin juga kecamatan lainnya di Luwu Utara. Selain fisik sekolah, tenaga pengajarpun menjadi persoalan di desa ini. Guru-guru yang berasal dari luar desa dan parahnya berstatus PNS biasanya sering datang telat atau bahkan tidak masuk mengajar dengan berbagai alasan. Beda halnya tenaga pengajar yang tinggal di desa ini dan hanya berstatus sebagai honorer, pagi-pagi mereka sudah harus menuju ke sekolah, jika tidak maka murid-murid yang datang akan kembali pulang ke rumah sebab mereka tidak menemukan guru yang siap mengajar di kelas. Seringkali tenaga pengajar ini (seorang wanita) meninggalkan kewajiban mereka sebagai ibu rumah tangga di pagi hari. Beruntung suami mereka mau mengerti dengan kondisi tersebut. Kecemburuan pasti ada, namun jangan dipandang sebagai percik konflik sosial tapi sebagai cambukan keras bahwasanya keadilan sosial

utamanya dalam dunia pendidikan masih jauh api dari panggung. Seharusnya pemerintah pusat lebih bijak melihat situasi seperti ini misalnya dengan memprioritaskan tenaga pengajar yang berdomisili di daerah tersebut. Sebab mereka tidak hanya mengejar gaji semata, namun beban moral untuk memajukan desa mereka melalui pendidikan selalu menghantui dan menjadi api semangat untuk terus bekerja.

Perilaku masyarakat tradisional masih bertahan di desa ini. Matua adalah pemangku adat yang ditunjuk berdasarkan genealogi. Dalam menjalankan tugasnya Matua dibantu oleh dua orang yang masing-masing membidangi pelaksana adat. Pungarong dan To Siaja, adalah dua lembaga adat yang masing-masing memiliki fungsi berbeda. Pungarong berfungsi sebagai lembaga musyawarah yang memutuskan masalah pertanian seperti waktu untuk menanam dan panen. Jadi masyarakat di desa ini tidak sembarangan dalam menanam padi, harus bersamaan dengan waktu yang sudah ditentukan berdasarkan hasil musyawarah. Sedangkan To Siaja adalah lembaga adat yang bertugas untuk menjaga keamanan desa, memberikan sanksi kepada pelanggar norma adat. Seperti menetapkan hukuman untuk pelaku perkelahian, pencurian, *silariang* (kawin lari) dan lainnya.

Untuk tempat wisata menurut saya keseluruhan tampilan desa ini adalah tempat wisata yang sesungguhnya. Lokasinya yang berada di lembah di antara dua gunung dengan kabut yang selalu menutupi puncaknya. Suara percikan air di bebatuan menyatu dengan warna-warni bunga di pinggir jalan. Sesekali nampak burung elang, berputar-putar di atas gelombang angin. Namun bagi anda yang membutuhkan lokasi khusus untuk tempat mendirikan tenda untuk menginap, di desa ini tersedia lokasi camp dengan posisi yang sangat cocok. Puncak Tabone namanya, adalah lokasi *camp* yang berada di daerah ketinggian di hutan pinus. Anda bisa memasang tenda di sini juga *hammock* tentunya, untuk sekedar bersantai ria bersama keluarga. Lokasi ini masih dalam kategori *hidden paradise* sebab belum begitu dikenal masyarakat utamanya masyarakat Sulawesi.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Penulis dapat dihubungi melalui email weandaraadar@gmail.com

Pelatihan Kompetensi Analis Kebijakan di Aceh

Oleh **RIO AFIFUDDIN**



Dalam upaya mendukung proses ke arah sertifikasi profesi Analis Kebijakan, LAN bekerjasama dengan Knowledge Sector Initiative (KSI) untuk pelaksanaan kegiatan pengembangan profesi Analis Kebijakan, yang kemudian berkolaborasi dengan BaKTI untuk menyelenggarakan Pelatihan Kompetensi Analis Kebijakan. Melalui pelatihan ini para peserta akan memperoleh pengetahuan dan kemampuan sebagai Analis Kebijakan yang nantinya dapat menjadi modal untuk mengikuti sertifikasi profesi Analis Kebijakan sesuai standar dalam KKNIProfesi Analis Kebijakan di Indonesia.

Pelatihan Kompetensi Analis Kebijakan telah dilaksanakan di Hotel Hermes Palace, Banda Aceh selama lima hari dari tanggal 26-30 November 2018. Dua puluh sembilan peserta terpilih dari berbagai latar belakang baik dari ASN maupun Non-ASN seperti Pemerintah Aceh (provinsi maupun kabupaten dan kota), perguruan tinggi dan akademisi, pihak swasta, mitra pembangunan internasional, organisasi masyarakat sipil, maupun PKP2A IV LAN Aceh.

Instruktur pelatihan ini adalah para ahli bidang kebijakan publik yang berpengalaman, yaitu

Dr. Retno Sunu Astuti, M.Si (Pakar Manajemen dan Kebijakan Publik Universitas Diponegoro), Dr. Sait Abdullah, S.Sos, M.Pol, Adm dari Pusat Pembinaan Analis Kebijakan (PUSAKA-LAN) dan dua instruktur dari PKP2A IV LAN Aceh; Said Fadhil, S.IP, MM (Kepala Bagian Administrasi PKP2A IV LAN Aceh), dan Ir. Faizal Adriansyah, M.Si (Kepala PKP2A IV LAN Aceh).

Di hari pertama pelatihan, Budhi Bahroelim dari Knowledge Sector Initiative (KSI) memberikan pengantar kegiatan dengan menekankan pentingnya semangat *evidence-based policy* atau kebijakan berbasis bukti dalam penyusunan dan implementasi kebijakan di Indonesia, yang juga semangat yang dikembangkan oleh KSI. Beliau menambahkan bahwa KSI bekerjasama dengan LAN untuk mengembangkan profesi Analis Kebijakan, termasuk dengan kerjasama bersapa KPPOD (Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah) dan AAKI (Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia) untuk mengembangkan SKKNI atau Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia untuk Profesi Analis Kebijakan. Profesi Analis Kebijakan sendiri bertugas menerjemahkan rumusan kebijakan untuk diterapkan di publik.



Foto : Rio Afifuddin /Yayasan BaKTI

Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Ketenagakerjaan (P2EK) Bappeda Aceh, Marthunis Muhammad menyampaikan bahwa Pemerintah Aceh melihat pengembangan Profesi Analis Kebijakan sebagai kebutuhan di Aceh, melihat tantangan yang dimiliki Aceh dari bidang kebijakan pembangunan. Dilihat dari perkembangan dewasa ini, indikator pembangunan Aceh jauh lebih rendah dari rata-rata nasional dan daerah lain di Indonesia, sementara anggaran yang dimiliki Aceh sangatlah besar. Oleh karena itu, beliau menekankan pentingnya menghasilkan Analis Kebijakan yang tangguh dan mampu memberikan kajian dan masukan yang baik agar ranah kebijakan di Aceh menjadi tepat sasaran, mengingat sokongan otonomi khusus untuk Aceh mempunyai masa waktu yang tidak lama lagi.

Ibu Retno Sunu Astuti sebagai instruktur pelatihan hari pertama membuka hari pertama pelaksanaan pelatihan dengan materi konsep dan studi kebijakan publik. Dalam pengantarnya, Ibu Retno menekankan definisi kebijakan publik sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dalam mewujudkan tujuan dan sasaran tertentu atau untuk memecahkan

masalah tertentu. Lebih lanjut, kebijakan publik dalam konsepsinya adalah proses perumusan dan implementasi yang meliputi serangkaian kegiatan yang direncanakan dan melibatkan interaksi antara instansi pemerintah, politisi, legislatif, dan masyarakat. Kebijakan publik juga melibatkan nilai-nilai dan kepentingan anggaran sehingga prosesnya sangat kompleks.

Dalam kontekstual Pemerintahan di Aceh, Qanun berlaku sebagai produk legislasi yang berskala kedaerahan atau disebut Perda Syariah. Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Aceh, dinyatakan bahwa Qanun Aceh adalah Peraturan Perundang-Undangan sejenis Peraturan Daerah yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat di Aceh. Qanun Aceh adalah peraturan yang berlaku di seluruh wilayah Aceh, disahkan oleh Gubernur setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. Qanun Kabupaten/Kota berlaku di masing-masing kabupaten/kota setelah mendapat persetujuan bersama dengan DPRKab/DPRKota. Meskipun demikian, materi muatan yang ada di Qanun tidak boleh melampaui materi yang seharusnya dimuat dalam Perda.

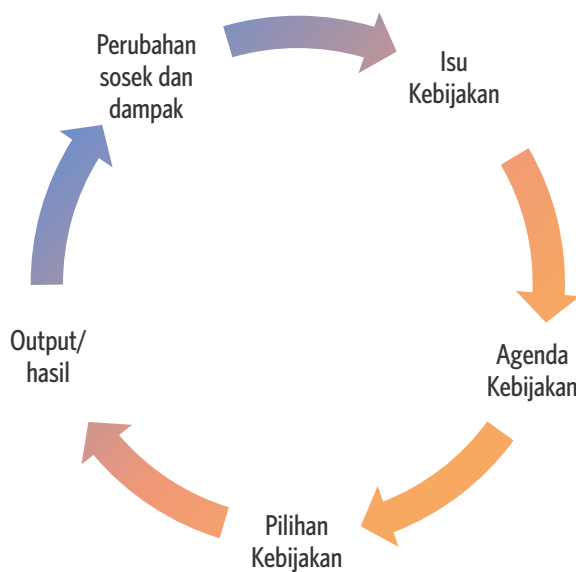
Dalam pembahasan selanjutnya, Ibu Retno menjelaskan mengenai *Evidence-Based Policymaking (EBP)* yaitu perumusan kebijakan yang seluruh tingkatan prosesnya didasarkan pada data dan informasi dari hasil-hasil penelitian atau informasi lain yang relevan untuk mencapai efektivitas kebijakan. EBP merupakan sebuah metode yang digerakkan dalam pemerintahan publik dewasa ini karena implementasinya akan mengurangi pemborosan pengeluaran, memperluas program yang inovatif, dan memperkuat akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Lanjut ibu Retno adalah bahwa berdasarkan Permen PAN dan RB 45 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Analis Kebijakan dan Angka Kreditnya, seorang AK melakukan kajian dan analisis untuk membantu merumuskan cara untuk memecahkan masalah. Selain itu, seorang AK juga bertugas menyediakan informasi tentang konsekuensi dari suatu kebijakan. Seorang AK juga diharapkan dapat mengidentifikasi isu publik yang perlu menjadi agenda kebijakan pemerintah. Namun demikian, keputusan akhir berada pada Pembuat Kebijakan.

Pak Sait Abdullah dari PUSAKA-LAN menjadi instruktur pelatihan di hari ketiga, dengan membawakan materi penyusunan dan pendekatan *policy brief* atau saran kebijakan. Dalam pemaparannya, Pak Sait menjabarkan definisi *policy brief* sebagai sebuah dokumen ringkas dan netral yang berfokus pada isu tertentu yang membutuhkan perhatian pengambil kebijakan. *Policy brief* memaparkan alasan dan rasional pemilihan alternatif kebijakan tertentu yang ada ada pada tataran perdebatan kebijakan. Lanjut beliau, bahwa berbeda dengan *policy paper* yang bersifat akademis, *policy brief* bersifat profesional karena ditargetkan untuk pembaca yang memiliki waktu terbatas untuk mengambil keputusan untuk kebijakan.

Dalam penutupnya, Pak Sait menyimpulkan bahwa *policy brief* memiliki dua tujuan utama, yaitu sebagai media eksplorasi dan advokasi. Sebagai media advokasi, *policy brief* memberikan pilihan terhadap sebuah solusi kebijakan tertentu, sedangkan sebagai media eksplorasi, *policy brief* terdiri atas diskusi, pembahasan dan perdebatan tentang masalah kebijakan dan berbagai alternatif solusi tanpa memberikan suatu rekomendasi terpilih.

Pak Said Fadhil dari PKP2A IV LAN Aceh menjadi instruktur pelatihan di hari keempat membawakan *Stakeholders Mapping* dan Advokasi Kebijakan. Di mata ajar pertama, Pak Sait



Gambar Alur Cakupan Kegiatan Analisis Kebijakan

Fadhil menjabarkan bahwa memahami *Stakeholders Mapping* sangat perlu, karena seorang analisis kebijakan diharapkan mampu untuk mengidentifikasi peran, hubungan, melakukan analisis dan strategi komunikasi dari dan kepada pemangku kepentingan dalam ranah kebijakan.

Pak Said Fadhil menjabarkan advokasi kebijakan, yaitu cara dan usaha sistematis dan terorganisir untuk memengaruhi dan mendesak



Foto : Rio Affuddin /Yayasan BaKTI



Foto : Rio Affuddin /Yayasan BaKTI

terjadinya perubahan dalam kebijakan publik secara bertahap dan maju. Upaya dalam kebijakan publik ditujukan untuk memperbaiki atau mengubah suatu kebijakan sesuai dengan kehendak atau kepentingan mereka yang mendesak terjadinya perbaikan atau perubahan tersebut. Advokasi dalam kebijakan berangkat pada visi pembangunan sosial, yaitu adanya perhatian terhadap pemberdayaan dan pembangunan masyarakat melalui aksi sosial. Namun demikian, beliau juga menekankan bahwa advokasi kebijakan tidak semata-mata bersifat *charity*, tetapi menjadi alat dan mekanisme yang bisa dipakai untuk memperjuangkan perubahan kebijakan dan terwujudnya keadilan sosial.

Dalam pemaparan akhirnya, Pak Said Fadhil menjabarkan konsultasi publik sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan. Untuk itu, konsultasi publik merupakan sebuah keharusan di suatu negara demokrasi. Melalui proses ini, terjadi hubungan dua arah antara pemerintah dan masyarakat, meskipun dalam praktiknya konsultasi publik tidak selalu berada dalam tingkatan deliberatif atau partisipatif dalam pelibatan publik, karena pengambilan keputusan tetap dilakukan oleh pihak eksekutif selaku lembaga pemegang kewenangan. Empat tingkat keterlibatan masyarakat dalam proses konsultasi publik yaitu; pertukaran informasi, konsultasi, pelibatan, dan kolaborasi.

Di hari terakhir pelaksanaan pelatihan, Kepala PKP2A IV LAN Aceh, Pak Faizal Adriansyah hadir dengan membawa materi Isu-Isu Strategis Analisis

Kebijakan. Dalam pengantarnya, beliau memaparkan bahwa dengan berkembangnya zaman menjadi era modern dan komputerisasi, maka perlu adanya penyesuaian yang harus dilakukan oleh setiap orang, termasuk analisis kebijakan yang harus mengadaptasi isu-isu terkini. Untuk itu, setiap analisis kebijakan juga harus keluar dari *comfort zone* dan merangkul perubahan yang ada dengan melakukan adaptasi yang diperlukan.

Lima hari pelaksanaan kegiatan Pelatihan Kompetensi Analisis Kebijakan untuk ASN dan Non-ASN memberikan pengalaman, pengetahuan, dan kemampuan bagi tiga puluh peserta untuk memahami proses pembuatan kebijakan publik mulai dari mekanisme menggagas, penentuan kebijakan, proses pelaksanaan/implementasi hingga mengevaluasi kebijakan yang telah dilaksanakan. Pada akhirnya, Pelatihan Kompetensi Analisis Kebijakan membangun semangat belajar, membekali peserta dengan pengetahuan, kemampuan serta kompetensi yang memadai untuk menjadi Analisis Kebijakan.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Untuk informasi lebih lanjut mengenai kerjasama BaKTI, KSI-LAN untuk Peningkatan Kompetensi Analisis Kebijakan, dapat menghubungi email info@bakti.or.id

Antenatal Care Hipnoterapi

Oleh **ANJAS RUSLI**

Antenatal Care Hipnoterapi adalah ilmu psikoneurofisiologis yang secara saintifik didasarkan pada perubahan frekuensi dan amplitude gelombang otak dari kondisi beta ke kondisi delta yang mengakibatkan meningkatnya fokus, konsentrasi, dan penerimaan terhadap pesan mental yang diberikan kepada pikiran bawah sadar bagi ibu hamil dan ibu bersalin.

Kabupaten Luwu Utara terletak di Pulau Sulawesi dengan karakteristik wilayah 3 kecamatan sangat terpencil di daerah pegunungan, 6 dataran pedesaan, 1 wilayah perkotaan dan 2 wilayah pesisir membuat pelayanan *Antenatal Care* pada ibu hamil sulit dilaksanakan dan tercapai, akibatnya kematian ibu terus meningkat setiap tahunnya dan menempatkan Luwu Utara di posisi ke tiga tertinggi di Provinsi Sulawesi Selatan. Kejadian AKI di Kabupaten Luwu Utara tahun 2014 sebanyak 6 kasus, pada tahun 2015 sebanyak 7 kasus, dan tahun 2016 sebanyak 11 kasus. AKB tahun 2016 sebanyak 69 kasus, dan tahun 2017 sebanyak 73 kasus, sedangkan kejadian Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) penyebab *stunting*

meningkat di Tahun 2016 sebanyak 238 kasus dan Tahun 2017 sebanyak 275 kasus.

Untuk menjawab tantangan tersebut dan sekaligus mencapai target pembangunan berkelanjutan (SDGs) sebuah inovasi bidang kesehatan melalui pendekatan dan pelayanan gender bagi perempuan yaitu *Antenatal Care Hipnoterapi* yaitu ilmu psikoneurofisiologis yang secara saintifik didasarkan pada perubahan frekuensi dan amplitude gelombang otak dari kondisi beta ke kondisi delta yang mengakibatkan meningkatnya fokus, konsentrasi, dan penerimaan terhadap pesan mental yang diberikan kepada pikiran bawah sadar bagi ibu hamil dan ibu bersalin.

Tujuan utama yang harus diselesaikan dari inisiasi program *Antenatal Care Hipnoterapi* adalah: Menurunkan angka keluhan ibu hamil selama masa kehamilan seperti emesis, sakit kepala, sakit ulu hati, depresi, tidak percaya diri, dan takut menghadapi persalinan, Persalinan aman dan menenangkan, serta mengurangi rasa sakit saat melahirkan, bahkan tanpa rasa sakit. Mengurangi secara substansial kejadian BBLR penyebab anak kerdil (*stunting*), Memberdayakan seluruh wanita dengan memberikan akses kepada pelayanan kesehatan reproduksi bagi ibu hamil dan ibu bersalin.

Inovasi *Antenatal care Hipnoterapi* melahirkan kebijakan yang berkelanjutan dan menjadi sebuah sistem pelayanan kesehatan, hal ini diperkuat dengan diterbitkannya regulasi Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2017 tentang *Antenatal Care Hipnoterapi*.





Inovasi *Antenatal Care Hipnoterapi* bagi ibu hamil dan ibu bersalin melalui metode *endhorpin tapping* dan *endhorpin tauching* serta hipnosis relaksasi dalam rangka menjaga kesehatan ibu hamil dan menyelamatkan ibu bersalin dari kematian ibu dan bayi.

Melalui inovasi ini, ibu hamil dapat melakukan pengobatan sendiri setelah diajarkan metode hipnosis oleh tenaga kesehatan terlatih, sehingga keluhan atas kehamilan dapat teratasi. Dalam pelaksanaan *Antenatal Care Hipnoterapi* dalam kelas ibu hamil yang selama ini tidak mendapat dukungan penuh dari suami justru memperlihatkan dukungan / respon dengan hadir dalam kelas ibu hamil tersebut yang menyebabkan penyembuhan keluhan ibu hamil lebih cepat tercapai.

Sebelum inovasi ini dilaksanakan, pengobatan keluhan ibu hamil dilakukan dengan memberikan obat sesuai keluhannya, padahal zat kimia yang terkandung dalam obat yang dikonsumsi oleh ibu hamil dapat memunculkan efek samping yang

Para ibu hamil sedang melakukan proses relaksasi yang merupakan bagian dari metode persalinan dengan *Antenatal Care Hipnoterapi* di Pustu Kappuna - Wilayah Puskesmas Masamba.

Foto : **Pemkab Luwu Utara**

dapat berpengaruh pada pertumbuhan janin. Tetapi pengobatan dengan metode *Antenatal Care Hipnoterapi* tanpa menggunakan obat dan tanpa efek samping karena hanya mengalirkan energi positif kepada ibu hamil dan ibu bersalin.

Pelaksanaan *Antenatal Care Hipnoterapi* dapat memberikan ketenangan dan kenyamanan bagi ibu hamil dan ibu bersalin, melalui metode pelepasan energi negatif dan mengalirkan sugesti positif kepada pasien, sehingga ibu hamil merasa nyaman dan siap dalam menghadapi kehamilan dan persalinan. Inovasi ini, merupakan perikatan antara petugas kesehatan dengan pasien yang secara ikhlas dan mengharapkan kesembuhan dari Tuhan yang maha pengasih dan penyayang, pelaksanaannya akan berhasil jika petugas ikhlas



Foto : Pemkab Luwu Utara

melayani pasien dan pasien memberikan kepercayaan kepada petugas.

Dengan metode inovasi ini maka dapat mengurangi beban pemerintah dalam pengadaan obat dan biaya rawat jalan dan rawat inap bagi ibu hamil yang memerlukan perawatan, serta pelaksanaannya gratis bagi seluruh ibu hamil.

Hasil pelaksanaan berdampak pada kesembuhan atas keluhan ibu hamil tahun 2017 sebanyak 1.136 dari 1.137 orang, dan sebanyak 2.302 ibu hamil tahun 2018, menurunkan Angka Kematian Ibu sampai dengan 0 (nol) kematian di 77 desa dan 14 puskesmas, melebihi target SDGs sampai tahun 2030 sampai di bawah target SDGs di bawah 70 per 100.000 KH atau 0,0007, begitupun

dengan AKB tahun 2018 mampu diturunkan sampai hingga 9 kematian bayi neonatal dari 2.302 Kelahiran Hidup atau sebesar 3,91%, jauh di bawah target SDGs sampai tahun 2030 hingga 12 per 1.000 KH atau 12%. Dampak ikutan dari inovasi ini adalah terjadinya penurunan Angka BBLR penyebab anak kerdil (stunting) dari 275 kasus pada tahun 2017 menurun hingga tersisa 50 kasus pada Tahun 2018. Sisi baiknya inovasi ini adalah Kehadiran jumlah ibu hamil dalam kelas ibu meningkat drastis yang sebelum inovasi hanya berkisar 50%, kemudian meningkat menjadi 90% bahkan sampai 100%, akibat dari peningkatan mutu pelayanan kesehatan yang ramah dan dengan hati tanpa menggunakan obat dan tanpa

DAMPAK SEBELUM DAN SESUDAH PENERAPAN ANC HIPNOTERAPI

Sasaran	Sebelum	Sesudah
Pelayanan kesehatan ibu hamil	Keluhan ibu hamil belum dapat disembuhkan bahkan dengan pemberian obat.	Menyembuhkan 1.136 ibu hamil dari 1137 yang di ANC Hipnoterapi.
Tenaga kesehatan terlatih	Belum ada tenaga terlatih	Telah dilatih 103 orang tenaga kesehatan.
Kehadiran jumlah peserta kelas ibu hamil.	Paling banyak 50% dari total ibu hamil dalam satu desa.	Di atas 90% sampai 100% ibu hamil
Angka Kematian Ibu daerah lokus ANC Hipnoterapi (37 Desa dan 4 kelurahan).	Terdapat 7 kematian di tahun 2016	Tahun 2017 tidak ada (0) kematian
Angka Kematian Ibu se Kab. Luwu Utara (166 desa dan 7 kelurahan).	Tahun 2016 = 11 kematian	Tahun 2017 = 5 kematian



(Kiri) Seorang pasien sedang dibantu proses persalinannya dengan metode hipnoterapi relaksasi oleh bidan Puskesmas Cendana Putih. **(Kanan)** Inovasi Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Utara, Antenatal Care (ANC) Hipnoterapi resmi dinobatkan sebagai inovasi dengan kategori outstanding alias terpuji. Hal itu ditandai dengan pemberian penghargaan Top 40 Inovasi Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN-RB) yang diserahkan Wakil Presiden Jusuf Kalla kepada Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani di Jakarta Convention Center (JCC).

efek samping. Hal ini dapat mengurangi beban pemerintah dalam penggunaan obat dalam mengatasi keluhan sakit ibu hamil, serta menurunkan risiko kejadian penyakit bawaan bagi janin yang dapat menyebabkan BBLR salah satu penyebab stunting.

Hal yang unik lainnya karena pasien yang gagal pada hipnoterapi pertama akan sembuh pada hipnoterapi selanjutnya dan penanganan kepada pasien akan berhasil jika petugas yang melayani memiliki empati yaitu sifat yang ikhlas dalam melayani, sehingga terbentuk ikatan batin secara emosional antara pasien dan pelayan kesehatan.

Inovasi *Antenatal Care Hipnoterapi* ini pada awal pelaksanaan tahun 2017 diuji coba di 2 Puskesmas dengan 30 desa sampai dengan bulan Juli 2017 melayani 373 ibu hamil dan sembuh dari masalah kehamilan yang dideritanya. Selanjutnya pada tahun yang sama direplikasi ke 5 puskesmas dan 68 desa, dengan capaian mampu menyembuhkan ibu hamil sebanyak 1.136 pasien dari 1.137 pasien.

Kemudian pada tahun 2018 direplikasi ke 14 Puskesmas dan 77 desa dan melayani ibu hamil sebanyak 2.302 ibu hamil dan 1.250 ibu bersalin, semua ibu hamil dan ibu bersalin yang ditangani

melalui metode hipnoterapi ini dapat disembuhkan dan mendapat ketenangan pada saat melahirkan.

Dalam perkembangannya, metode Hipnoterapi ini dikembangkan bukan hanya kepada ibu hamil dan ibu bersalin tetapi juga ke pengobatan penyakit degeneratif seperti pasien sakit kepala, stres, hipertensi dan penyakit tidak menular lainnya, bahkan digunakan pada pasien yang keracunan dan dapat disembuhkan.

Inovasi ini juga telah diadopsi oleh beberapa kabupaten seperti kabupaten Sinjai, Bantaeng dan Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan, dan saat ini, masih beberapa kabupaten lainnya yang akan mengadopsi metode ini.

Program *Antenatal Care Hipnoterapi* juga berhasil lolos ke kompetisi UNPSA 2018 (United Nations of Public Service Awards) kompetisi inovasi pelayanan publik yang dilaksanakan oleh PBB.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Penulis adalah Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan. Dapat dihubungi melalui email anjasrusli@yahoo.co.id

Program Rintisan KIAT Guru Berhasil Meningkatkan Hasil Belajar Murid

Indonesia's KIAT Guru Pilot – Improving Student Learning Outcomes

Oleh **DEWI SUSANTI dan SHARON KANTHY**

Pada tanggal 13 Desember 2018, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Ditjen GTK - Kemendikbud) dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), bersama dengan lima Pemerintah Daerah Kabupaten Rintisan KIAT Guru menyelenggarakan Rapat Tim Koordinasi Nasional (TKN) di Jakarta. Rapat ini bertujuan untuk melaporkan capaian Program Rintisan sekaligus merumuskan rekomendasi kebijakan nasional dan kebijakan daerah untuk memperbaiki tata kelola guru, khususnya untuk pengaitan Tunjangan Khusus Guru (TKG) dengan kehadiran dan pelibatan masyarakat dalam upaya peningkatan hasil belajar murid.

Rapat TKN didahului dengan pelaksanaan lokakarya akhir tahun di Bogor, 10-12 Desember, yang melibatkan perwakilan pemangku kepentingan dan penerima manfaat dari pemerintah kabupaten, kecamatan, desa, sekolah dan masyarakat dari lima kabupaten rintisan. Hasil dari lokakarya menjadi bahan laporan kepada Tim Pengarah TKN yang terdiri dari perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas, Kementerian Desa, Pembangunan Tertinggal dan Transmigrasi, Pemerintah Kabupaten Sintang, Landak, Ketapang dan Manggarai Timur, serta Mitra Pembangunan: Pemerintah Australia, USAID, World Bank dan Yayasan BaKTI.

Berdasarkan hasil evaluasi dampak yang dilakukan Bank Dunia, Rintisan KIAT Guru berhasil meningkatkan kehadiran guru dan murid, yang berpengaruh terhadap peningkatan secara

The Directorate General of Teacher and Education Personnel at the Ministry of Education and Culture (MoEC) held a national coordination team (TKN) meeting in Jakarta on 13th December, 2018, with the National Team for the Acceleration of Poverty Alleviation (TNP2K) and the five district governments hosting the KIAT Guru pilot. The TKN reported on the pilot's progress and created policy recommendations for national and local governments to improve teacher governance. Of particular focus was tying the payment of teachers' remote area allowance to teacher presence, and empowering communities to improve student learning outcomes.

The TKN meeting was preceded by a workshop in Bogor, West Java (10-12 December 2018), with participants representing the program's key stakeholders and beneficiaries—district, subdistrict and village governments; as well as schools and communities of the five pilot districts.

The results of the workshop were then reported in this meeting to TKN advisors from the Ministry of National Development/the National Development Planning Agency (Bappenas); Coordinating Ministry for Human Development and Culture (Kemenko PMK); MoEC; the Ministry of Finance (MoF); the Ministry of Villages, Disadvantaged Areas and Transmigration (MoV); the respective district governments; development partners; and Yayasan BaKTI.

The results of the World Bank's KIAT Guru pilot impact evaluation show that the pilot improves both teacher and student presence, which significantly improves student learning outcomes, and decreases rates of illiteracy and innumeracy. The most significant impact is realized in schools where the payment of teachers' remote area allowance is tied to teacher presence; which is



Foto/Photo : **Abdurrahman Doge/TNP2K**

signifikan hasil belajar murid, dan penurunan tingkat buta huruf dan buta angka. Dampak paling positif secara khusus ditemukan pada sekolah yang menerapkan pembayaran TKG yang dikaitkan dengan kehadiran guru yang direkam dengan aplikasi KIAT Kamera. Pencapaian hasil belajar murid di kelompok ini tiga setengah kali lebih cepat dibandingkan dengan sekolah-sekolah pada kelompok kontrol.

Menanggapi kabar baik tersebut, lima Kabupaten Rintisan berkomitmen untuk memperluas cakupan Program KIAT Guru dari 203 SD dengan menambahkan 183 SD baru, sehingga jumlah total Sekolah Peserta Program Rintisan KIAT Guru di tahun 2019 akan mencakup 386 SD.

Deputi Bidang Dukungan Kebijakan, Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan, Sekretariat Wakil Presiden, Bambang Widanto, menggarisbawahi bahwa "Rintisan KIAT Guru adalah langkah awal dalam menemukan mekanisme yang tepat dalam mengaitkan tunjangan dengan kinerja untuk semua ASN, termasuk guru... guna meningkatkan hasil belajar murid."

Sebagai langkah tindak lanjut ke depan, Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, R. Agus Sartono, menghimbau agar "KIAT Guru diselaraskan dengan kebijakan lainnya, seperti Lembaga

Rapat Tim Koordinasi Nasional Program Rintisan KIAT Guru dihadiri oleh 71 peserta dari berbagai Kementerian/ Lembaga, Pemerintah Daerah, dan mitra pembangunan.

KIAT Guru Pilot's National Coordination Team meeting was attended by 71 participants from related government ministries and institutions, local governments, and development partners.

captured using the android-based KIAT Camera application. The progress of students in this group is 3.5 times better than students in control group schools.

In response to the good news, the five pilot districts, Sintang, Landak, Ketapang, East Manggarai and West Manggarai, committed to expanding the program's coverage from 203 primary schools to 386 schools in 2019.

The TKN drew favorable responses from a number of key national stakeholders. Bambang Widanto, Deputy for Policy Support, Human Development and Equality at the Office of the Vice President, said, "KIAT Guru Pilot is the initial step in finding the correct mechanism to tie allowance to the performance of state apparatus, including teachers, to improve students' learning outcomes."

R. Agus Sartono, Deputy for Education and Religion Coordination at the Coordinating Ministry for Human Development and Culture,

Pendidikan Tenaga Keguruan (LPTK) dan Sarjana Mendidik di Daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (SM3T) dalam mengatasi masalah distribusi guru.”

Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas, Subandi, menyambut capaian pelaksanaan Rintisan dan mengarahkan agar ”Pendekatan KIAT Guru diperluas ke daerah lain.”

Sebagai Ketua Tim Pengarah, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Supriano, menutup rapat dengan menegaskan bahwa ”Payung regulasi penetapan Program KIAT Guru sebagai salah satu model tunjangan berbasis kinerja dan Program Prioritas Menteri akan diperpanjang di tahun 2019.”

Supriano kemudian mengarahkan agar ”Sebelum kebijakan tunjangan berbasis kinerja diterapkan secara nasional di tahun 2020, diharapkan Program Rintisan KIAT Guru dicobakan ke jenjang pendidikan menengah dan di wilayah perkotaan.”

suggested, “KIAT Guru be aligned with other policies—such as the Teacher Training Institution (LPTK) and the Bachelor Degree Education Program for Remote, Outlying and Disadvantaged Regions (SM3T)—in solving the issue of teacher distribution.”

Subandi, Deputy for Human, Community and Cultural Development in Bappenas, welcomed the achievements of the pilot and recommended the approach “to be expanded to other regions.”

Supriano, Chair of the National Coordination Team, and Director General of Teacher and Education Personnel, closed the meeting asserting that, “The regulation for KIAT Guru program as a model of performance-based allowance, and as a minister priority program, will be extended in 2019”; adding, “before the performance-based allowance is implemented as national policy in 2020, the pilot should be tested in secondary schools and urban areas.”

Program Rintisan KIAT Guru bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan di daerah sangat tertinggal melalui pemberdayaan masyarakat dalam menilai layanan guru dan dikaitkannya pembayaran Tunjangan Khusus Guru dengan kehadiran guru atau kualitas layanan guru. Program ini merupakan kolaborasi antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dan lima pemerintah kabupaten PDT: Manggarai Barat dan Manggarai Timur di Nusa Tenggara Timur, serta Sintang, Landak dan Ketapang di Kalimantan Barat. Program ini diimplementasikan oleh Yayasan BaKTI, dengan dukungan teknis dari World Bank dan pembiayaan dari Pemerintah Australia dan USAID.

KIAT Guru (Teacher Performance and Accountability) Pilot aims to improve education service delivery in remote villages by empowering communities and tying payment of remote area teacher allowances with either teacher presence or teacher service quality. The pilot is a collaboration between the Ministry of Education and Culture, the National Team for the Acceleration of Poverty Reduction (TNP2K), and the governments of five districts with disadvantaged villages. Yayasan BaKTI implements the program with technical supports from the World Bank and funding from the Government of Australia and USAID.

INFORMASI LEBIH LANJUT / FOR FURTHER INFORMATION

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang program KIAT Guru dapat menghubungi :

For further information about KIAT Guru Program, please contact :

info@bakti.or.id

Mengubah Disabilitas menjadi Kemampuan

Co-authors: **ZUZANA STANTON-GEDDES,
JOLANTA KRYSPIN-WATSON**

Sebelum bergabung dengan Bank Dunia, saya bekerja sebagai perancang kota dan sering memberi saran agar rencana pembangunan lebih mudah diakses bagi penyandang disabilitas. Sayangnya, banyak pengembang cenderung mengesampingkan kebutuhan mereka karena mengeluarkan biaya tambahan untuk melakukan penambahan desain yang buruk, atau yang lebih parah, membatasi akses untuk orang-orang tertentu.

Kelalaian seperti ini membuat kota menjadi tidak ramah bagi semua lapisan masyarakat termasuk penyandang disabilitas. Bencana dapat memperparah tantangan ini, seperti jalur atau informasi evakuasi yang tidak dapat diakses, tempat penampungan yang tidak sesuai-rancangan, hilangnya bantuan, dan terbatasnya kesempatan untuk membangun kembali mata pencaharian.

Foto : Bank Dunia Olah Digital : Frans Gosali



Pada bulan Oktober 2018, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional mengadakan lokakarya bersama Bank Dunia dan CBM Australia, dengan mengundang instansi pemerintah dan organisasi masyarakat untuk berbagi pelajaran dari program pemulihan pasca bencana di Indonesia, Jepang, Haiti, dan Nepal. Foto : **Bank Dunia**

Sekitar 12% masyarakat Indonesia merupakan penyandang disabilitas dan kemungkinan angka ini akan meningkat. Kebutuhan penduduk Indonesia yang bertambah tua, dengan kemungkinan 15% berusia lebih dari 65 tahun pada tahun 2035, tentunya akan meningkatkan risiko disabilitas. Bertambahnya kerentanan terhadap bencana dan perubahan iklim juga dapat menyebabkan luka dan cacat permanen.

Belakangan ini, banyak kota di Indonesia mengambil langkah yang signifikan dengan melakukan inklusi disabilitas untuk menjawab tantangan ini. Pada tahun 2017, 14 kota menandatangani Piagam Jaringan Walikota Indonesia menuju Kota Inklusif di Indonesia yang berkomitmen menghapus diskriminasi terhadap penyandang disabilitas. Kota Solo, Surabaya, dan Bandung bermaksud mengatasi masalah gender dan disabilitas dalam proses perencanaan dan penganggaran pembangunan lewat Musyawarah Perencanaan Pembangunan tahunan, mengikuti tren internasional yang mensosialisasikan perencanaan pembangunan inklusif, termasuk di negara-negara seperti Australia, Gambia dan Uganda.

Melihat adanya permintaan yang bertambah, dibutuhkan investasi yang lebih besar untuk membangun modal manusia, agar setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk berhasil. Bank Dunia berkomitmen untuk memberi investasi lebih besar bagi inklusi disabilitas. Sebagai bagian dari membangun kembali dengan lebih baik pasca bencana, salah satu komitmennya adalah pada tahun 2020, semua fasilitas umum yang didanai Bank Dunia untuk-proyek rekonstruksi pasca bencana akan ramah penyandang disabilitas – dan untuk Indonesia proyek ini akan didukung melalui hibah GFDRR.

Dengan semakin majunya Indonesia dan negara-negara lain dalam pembangunan inklusif penyandang disabilitas, ada banyak peluang untuk membangun secara lebih inklusif pasca bencana:

1 Manfaatkan data disabilitas yang terpilah untuk intervensi inklusif.

Data bisa membantu memandu rancangan pembangunan dan proyek pemulihan bencana. Saat ini, sedang dikumpulkan data terkait kebutuhan penyandang disabilitas dengan disabilitas yang berbeda pasca bencana di



Sulawesi Tengah, dan pemerintah telah melibatkan organisasi penyandang disabilitas dan para penyandang disabilitas sejak awal. Hal ini dapat memberikan banyak manfaat kepada penduduk yang terkena bencana.

2 Mengadopsi pendekatan *placemaking* dengan prinsip rancangan universal

Menggunakan pendekatan *placemaking*, penata kota bekerjasama dengan masyarakat termasuk orang-orang baik penyandang disabilitas maupun yang tidak, dari segala gender maupun umur, ketika merancang ruang publik untuk mengakomodasi kebutuhan mereka dan memperkuat hubungan antara berbagai kelompok masyarakat. Kota-kota yang membangun kembali pasca

bencana dapat memfasilitasi desain “charrettes” (lokakarya rancangan kolaboratif) bersama kelompok penyandang disabilitas dan kelompok lainnya untuk mensosialisasikan praktik rancangan universal yang inklusif.

3 Meningkatkan kepatuhan pembangunan dengan standar aksesibilitas

Meski Indonesia punya standar dan panduan teknis aksesibilitas, kepatuhan terhadap standar dan panduan teknis masih jadi tantangan. Audit aksesibilitas dan penilaian oleh para penyandang disabilitas dapat disederhanakan dalam proses penerbitan izin bangunan untuk mengidentifikasi solusi desain praktis. Program retrofit seismik, seperti yang didukung oleh Proyek Mitigasi Risiko Seismik dan Proyek Kesiapsiagaan Darurat Istanbul Bank Dunia, menangani standar mitigasi risiko gempa lain termasuk akses untuk keselamatan dan penyandang disabilitas.

4 Mengembangkan sistem kesiapsiagaan masyarakat inklusif.

Sistem peringatan dini dan ramalan cuaca, serta penandaan jalur evakuasi untuk jalan aman dan tempat pengungsian harus memberikan informasi penting dengan format yang berbeda. Ruang darurat dan tempat pengungsian dalam Proyek Rekonstruksi Gempa Bumi dan Pengurangan Risiko Lushan di Tiongkok sedang dirancang untuk

mengakomodasi semua orang baik penyandang disabilitas maupun yang tidak. Selain itu, rencana evakuasi di tingkat masyarakat harus mendukung akses cepat untuk alat bantu, misalnya tongkat berjalan atau alat bantu dengar.

5 Mensosialisasikan praktik inklusif disabilitas kepada petugas dan penyedia layanan tanggap darurat.

Beberapa institusi manajemen bencana lokal di Indonesia telah mendirikan unit layanan inklusif disabilitas. Institusi lainnya bisa belajar dari pendekatan ini. Pengembangan kapasitas yang ditujukan bagi petugas tanggap darurat dan penyedia layanan kemanusiaan bisa membantu mengatasi kebutuhan spesifik para penyandang disabilitas dan keluarga mereka selama masa tanggap darurat dan evakuasi.

6 Mengembangkan kerangka perlindungan sosial yang inklusif

Indonesia memberi beberapa program pendampingan sosial untuk keluarga miskin dan rentan. Dengan meningkatnya bencana di Indonesia, maka perlu ada sistem perlindungan sosial yang adaptif untuk yang bisa merespon kejadian tiba-tiba yang dialami dan mengakomodasi kebutuhan penyandang disabilitas. Ini bisa mencakup program bantuan tunai yang tepat sasaran; peluang *cash-for-work* dalam program pemulihan untuk seluruh lapisan masyarakat termasuk penyandang disabilitas; dan kegiatan pembangunan kembali mata pencaharian yang inklusif disabilitas.

Dengan merancang kota-kota yang mudah diakses dan sistem manajemen risiko bencana, seluruh lapisan masyarakat berkesempatan memiliki kemampuan untuk membangun ketahanan bencana dan berpartisipasi penuh dalam peluang ekonomi. Manfaat bagi masyarakat jauh lebih besar daripada biaya kecil yang dikeluarkan untuk mempertimbangkan desain yang dapat diakses di awal proses perencanaan pembangunan.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Artikel ini telah dimuat pada laman <http://blogs.worldbank.org/eastasiapacific/id/mengubah-disabilitas-menjadi-kemampuan-kesempatan-untuk-mensosialisasikan-perkembangan-inklusi>

Indonesian Young Thought Leaders on Environment 2019

The program calls for Indonesian 3rd or final year students and fresh graduates (bachelor and masters) to submit an essay on environmental issues.

This competition is fully organized in English.

Indonesian Young Thought Leaders on Environment 2019 is a mentorship program aimed to transform young individuals with knowledge, expertise and passions into agents of change in promoting evidence-based policies to protect environment and improve lives.

The program is organized by the World Resources Institute Indonesia (WRI Indonesia) in partnership with the Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) since 2015. Starting this year, this program is also supported by the Corruption Eradication Commission (KPK)'s Anti-corruption Learning Center (ACLC).

Call for essay: January 25th – March 5th, 2019

The program calls for Indonesian 3rd and final year students or fresh graduates (bachelor and masters) to submit an essay on corruption in natural resources sector. The essay competition will be followed by leadership training camp and internship at the World Resources Institute offices in Jakarta and Washington DC.

Info selengkapnya : www.batukarinfo.com/news/indonesian-young-thought-leaders-environment-2019

Kisah "Sekolah Bambu" dan Titik Bangkit Pendidikan di Lombok

Sejak gempa mengguncang Lombok, Nusa Tenggara Barat pada akhir Juli hingga awal September 2018, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat 606 gedung sekolah di Pulau Lombok dan Sumbawa rusak akibat gempa, termasuk 3.051 kelas.

Namun demikian, kegiatan belajar mengajar (KBM) harus diupayakan tetap berjalan meski gedung sekolah rusak dan ambruk.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sudah mendata kerusakan sarana pendidikan sekaligus mengampayekan gerakan kembali ke sekolah bagi siswa di NTB. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, mengatakan bahwa anak-anak yang terdampak gempa bumi di Lombok harus dipastikan tetap belajar, selain itu perlu ada trauma healing atau pemulihan trauma agar anak-anak kembali nyaman belajar. Info selengkapnya : www.batukarinfo.com/news/kisah-sekolah-bambu-dan-titik-bangkit-pendidikan-di-lombok

2019, Pemerintah Bangun 28,80 Kilometer Jalan di Maluku Tenggara Barat

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan menangani total sepanjang 28,8 kilometer jalan nasional di Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB), Provinsi Maluku, pada tahun ini. Secara keseluruhan, biaya yang akan digunakan untuk penanganan tersebut sebesar Rp 110,65 miliar yang dibagi menjadi preservasi rekonstruksi jalan nasional Pulau Larat dan Pulau Selaru sepanjang 10 kilometer. Kemudian preservasi rekonstruksi jalan nasional Pulau Yamdena sepanjang 8,80 kilometer, dan pelaksanaan rekonstruksi jalan nasional di Pulau Larat – Lamdesar Timur sepanjang 10 kilometer. Pembangunan infrastruktur ini bukan hanya dimaksudkan untuk mengejar ketertinggalan dan meningkatkan daya saing nasional, tetapi juga menumbuhkan sentra-sentra ekonomi baru yang memberikan nilai tambah bagi daerah.

Salah satunya melalui pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan di pulau terdepan Indonesia, yakni Pulau Yamdena, Pulau Selaru, dan Pulau Larat.

Dengan adanya pembangunan ini, diharapkan bisa menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, keamanan nasional, pertahanan negara dan bangsa, serta menciptakan stabilitas kawasan.

Info selengkapnya : www.properti.kompas.com/read/2019/01/16/100000921/2019-pemerintah-bangun-28-80-kilometer-jalan-di-maluku-tenggara-barat



Kegiatan di BaKTI

28 Januari 2019

Kelas Pintas PCMI 2019 Vol 1: Complex Problem Solving with Design Thinking

Purna Caraka Muda Indonesia (PCMI) Sulsel menggelar Kelas Pintas PCMI, program kelas singkat yang diadakan sebulan sekali selama satu tahun dan kali ini mengangkat tema *Skills Needed in 2020*. PCMI adalah sebuah organisasi kepemudaan yang didirikan tahun 1977 oleh para alumni program Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN) yang dilaksanakan oleh pemerintah Republik Indonesia. Kelas ini bertujuan untuk memberikan keahlian (*soft skills*) kepada pemuda-pemuda Indonesia, khususnya di Makassar agar mampu bersaing di dunia kerja nantinya. Kurikulum Kelas Pintas PCMI ini didesain dari beberapa penelitian yang telah mengungkapkan 8 *soft skill* yang dibutuhkan oleh setiap orang di tahun 2020 agar mampu bersaing dan bertahan dalam banyak hal. Untuk kelas perdana yang diadakan di Kantor BaKTI, topik yang diberikan kepada 23 peserta workshop terdiri dari mahasiswa dan profesional adalah *Complex Problem Solving with Design Thinking* yang mencakup *framework* dan tahapan dalam menyelesaikan masalah secara sistematis. Dengan metode *Design Thinking*,



diharapkan peserta mampu berpikir sistematis dalam menyelesaikan sebuah permasalahan dalam hal apa pun. Metode ini juga mampu membantu peserta dalam membuat sebuah penelitian dan proyek sosial yang sudah banyak dilakukan oleh pemuda Makassar. Kelas ini difasilitasi oleh Sidik Permana yang merupakan alumni program pertukaran mahasiswa ASEAN-India yang mewakili Sulawesi Selatan pada tahun 2018 lalu. Selain belajar teori, semua peserta mendapatkan kesempatan untuk berlatih dalam memecahkan masalah dan mempresentasikan ide mereka di hadapan peserta lainnya. Kelas ini akan kembali diadakan di bulan Februari dengan tema *Creativity*.



British Council menyelenggarakan *Info Session* Program *Active Citizens* bertempat di ruang pertemuan BaKTI Makassar. *Active Citizens* adalah program pelatihan kepemimpinan sosial yang mempromosikan dialog antar budaya dan pembangunan sosial berbasis masyarakat. Di Indonesia, program ini telah dilaksanakan sejak 2016 oleh British Council bekerjasama dengan beberapa mitra. Tujuan program ini untuk mendorong

1 Februari 2019

Info Session : Program Active Citizens

terwujudnya masyarakat yang terbuka melalui tata pemerintahan, menyuarakan aspirasi serta akuntabilitas yang baik. Dalam menjalankan dan mengembangkan program *Active Citizens*, British bekerja dengan mitra organisasi dengan melatih individu-individu yang ingin melakukan perubahan di komunitas atau organisasinya. *Info session* kali ini menghadirkan narasumber Emma Yunita, Program Manager Education & Society British Council dan Jimmy Febriyadi, Master facilitator untuk *Active Citizens*. Kegiatan ini dihadiri oleh 52 peserta berasal dari kalangan universitas, LSM, komunitas dan sektor swasta. Hingga saat ini British Council telah bekerja dengan sejumlah mitra dan telah melatih 66 fasilitator yang pada gilirannya telah melatih 544 warga negara aktif yang membantu mereka meluncurkan 121 proyek aksi sosial untuk memberi manfaat bagi masyarakat di Indonesia.



Mengenal dan Mengelola Terumbu Karang

PENULIS M. Ghufuran H. Kordi K.

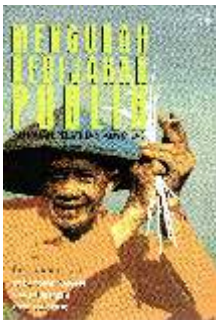
Terumbu Karang adalah kelompok organisme yang hidup di dasar perairan laut dangkal, terutama di daerah tropis. Secara ekologi, ekosistem terumbu karang berfungsi sebagai penyangga kehidupan biota pesisir dan lautan, serta sebagai pelindung pantai dari abrasi akibat terpaan arus, angin dan gelombang. Secara ekonomi, ekosistem terumbu karang adalah salah satu kawasan dengan potensi dan produksi ekonomi yang tinggi. Buku ini diharapkan mampu mendorong pelajar dan mahasiswa untuk mengenal dan mencintai laut.



Plang, Cerita di Balik Nama Jalan di Makassar

PENULIS Nasrul

Banyak cerita yang bisa ditemukan di balik sebuah plang nama jalan yang ada di Makassar. Di dalam buku ini setidaknya ada 40-an kisah tentang penanda jalan itu. Ada plang yang unik karena memuat nama partai, ada yang dibuatkan singkatannya agar tidak panjang kalau diucapkan, dan ada pula plang yang 'okkot' mengingat kebiasaan orang Makassar yang selalu memberi akhiran 'g' pada kata yang berakhiran 'n'. Tak ketinggalan pula riwayat hadirnya sebuah nama jalan yang digunakan sejak zaman Belanda dan masih ada hingga saat ini.



Mengubah Kebijakan Publik: Panduan Pelatihan Advokasi

PENULIS Roem Topatimasang, dkk.

Advokasi seperti halnya media lainnya yang berkaitan dalam rangka untuk pencapaian tujuan, tidaklah sehebat yang sering dibayangkan oleh pelakunya. Advokasi merupakan usaha sistemik dan terorganisir, untuk suatu perubahan secara bertahap-maju. Advokasi memang bukan revolusi, bahkan advokasi adalah suatu usaha perubahan sosial melalui media perjuangan yang menggunakan sistem yang ada. Buku ini merupakan sebuah modul pelatihan bagi aktivis advokasi kebijakan dan perorganisasian komunitas.



Menculik Puisi

PENULIS Rusdin Tompo

Buku ini memuat kumpulan puisi Rusdin Tompo yang didasarkan atas pengalaman penulis memotret realita sosial dan kehidupan bernegara yang menurutnya masih carut marut. Puisi-puisinya berbicara tentang kekuasaan, politik dan demokrasi, ironi penegakan hukum, ketiakhadiran sosial, nilai-nilai kemanusiaan serta religiusitas.